

Perempuan Dalam Partai Politik Islam di Indonesia
(Study Terhadap Peranan Perempuan Partai Persatuan Pembangunan
[PPP] Dalam Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1972-2004)

Skripsi
diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum)



Di Susun Oleh:
SITI ROHIMAH
NIM: 104022000819

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1430H/2009M

Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa”

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 29 Aprili 2009

UIN
Siti Rohimah

Perempuan Dalam Partai Politik Islam di Indonesia
(Study Terhadap Peranan Perempuan Partai Persatuan Pembangunan
[PPP] Dalam Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1972-2004)

Skripsi
diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum)

Oleh:

Siti Rohimah
NIM: 104022000819

Pembimbing

Dra. Hj. Tati Hartimah,MA
NIP. 150240484

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1430H/2009M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul **Perempuan Dalam Partai Politik Islam Di Indonesia (Study Terhadap Peran Perempuan Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dalam Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1971-2004)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 19 Mei 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum), Pada Program Study Sejarah dan Peradaban Islam.

Jakarta, 19 Mei 2009

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Drs.H.M. Ma'ruf Misbah, MA
NIP: 150 247 010

Penguji

Sekretaris Merangkap Anggota

Usep Abdul Matin, S.Ag. MA, MA
NIP: 150 288 304

Pembimbing

Anggota,

Dr.H. Abdul Wahid Hasyim, M. Ag
NIP:150227883

Dra.Hj Tati Hartimah, MA
NIP: 150 240 484

ABSTRAK

SITI ROHIMAH

Perempuan Dalam Partai Politik Islam Di Indonesia (Study Terhadap Peran Perempuan Dalam Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dalam Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1971-2004)

Peran perempuan dalam realitasnya masih menghadapi berbagai praktek diskriminasi di kalangan masyarakat, perempuan dianggap sebagai kelompok sosial yang sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi ini terjadi sebagai akibat dari komunikasi sosial yang terbentuk berdasarkan paradigma maskulinitas. Dalam hukum Fiqih Islam misalnya, paradigma maskulinitas mendasari berbagai keputusan hukum para fukoha yang menjadi penyebab utama terbentuknya sikap diskriminasi masyarakat muslim terhadap kaum perempuan

Peran yang dimaksud dalam uraian ini adalah seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian, peran politik perempuan dapat dimaknai dengan seperangkat harapan yang ditujukan pada kaum perempuan yang berkiprah di bidang politik atau di organisasi politik, atau lembaga-lembaga politik lainnya. Untuk memotret sejauh mana peran politik perempuan di Indonesia

Kaum perempuan di Indonesia selama pemerintah Orde Baru secara sistematis dikucilkan dari kehidupan politik, dengan ungkapan lain telah terjadi proses depolitisasi terhadap perempuan. kebijakan yang diambil rejim Orde Baru dalam kaitannya dengan perempuan didasarkan pada konsepsi tradisional di dalam masyarakat. Perempuan secara khusus dipromosikan pada wilayah yang a-politis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan, kecuali sebagai penyangga moral bangsa sehingga sulit untuk kaum perempuan aktif di sektor publik, selain itu stigma bahwa kaum perempuan tidak tepat berada di ranah publik, melainkan di ranah domestik. sehingga semangat kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik sangat kurang dan sangat sedikit perempuan yang mengerti tentang apa itu politik, dan bagaimana dinamika perpolitikan di Indonesia.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kiprah dan peran perempuan dalam lembaga politik formal (Partai politik) terhitung sejak tahun 1971-2004. Yang diteliti adalah sejauhmana peran perempuan di partai politik, seberapa besar pengaruh perempuan dalam politik dan partai politik, dan bagaimana perjuangan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik serta partai politik.

Objek yang akan penulis teliti adalah lembaga politik formal yaitu partai politik Islam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mana partai ini merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Terkait penelitian ini variabel yang penulis gunakan adalah korelasi antara peran perempuan dalam PPP dan Politik di Indonesia, Kebijakan Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Peran politik perempuan, dan bagaimana hubungan antara kader perempuan PPP dengan Elite Partai.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah tuhan seru sekalian alam atas segala rahmat, tawfik hidayah, serta inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Wa bil khusus kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Humaniora. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa seluruh umatnya kepada pengetahuan serta semangat untuk mencari luasnya ilmu di dunia ini, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para tabiinnya.

Skripsi yang berjudul perempuan dalam partai politik Islam di Indonesia study terhadap peran perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tahun 1971-2004 alhamdulillah mampu penulis rampungkan, penulis berharap karya ilmiah ini nantinya akan bisa bermanfaat bagi banyak orang.

Karya ilmiah ini dapat terselesaikan berkat bantuan beberapa pihak baik secara moril maupun materil, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Dr. H. Abdul Chair, MA beserta Pembantu Dekan dan seluruh staf Fakultas Adab dan Humaniora yang tak kenal lelah memberikan masukan serta dorongan dan doa selama penulis melaksanakan proses perkuliahan dan organisasi di kampus

2. Drs. H. Ma'ruf Misbah, MA, dan Usep Abdul Matin, MA.MA selaku Kajur dan Sekjur SPI yang tak kenal lelah membantu penulis mulai dari pengajuan proposal skripsi hingga menjadi sebuah skripsi yang siap dibaca dan bermanfaat bagi banyak orang.
3. Dra. Hj. Tati Hartimah. MA sebagai pembimbing yang tak pernah lelah membimbing dan memberikan saran, nasehat serta dukungan baik secara moral maupun materil kepada penulis
4. Almarhumah ibunda Hj. Nunung Rosita yang selalu ada dalam setiap langkah penulis selama ini, Ayah tercinta, Mamah Nargis, Bapak Edi yang memberikan kesempatan bagi penulis menjadi bagian dari keluarga beliau serta selalu memberikan kasih sayang mereka.
5. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (PP WPP) dan Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-PP DPR-RI) yang siap membantu penulis dalam pengumpulan data baik berupa buku, maupun dokumen.
6. Seluruh pegawai Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Perpustakaan FISIP UI, dan Perpustakaan DPR RI yang siap membantu penulis dalam pengumpulan buku dan dokumen yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kaka-kakaku teh Dede, teh Iis, teh Ade, dan a Adi, keponakan tercinta Fathur, Karmila dan Nadila serta seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan semangat dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga
8. Sahabat-sahabatku Revi, Udin, Chido, Haviz, Ujang, Murni, dan Maria, serta seluruh teman-teman SPI angkatan 2004 yang selalu siap membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga tidak segan-segan untuk mengkritik dan menegur penulis.
9. Teman-teman HMI Cabang Ciputat, DPP PARMA, BEMU, HMI KOFAH, dan KOHATI Cabang Ciputat dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu di sini terimakasih atas semua dukungan, nasehat, dan doanya kepada penulis

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan umumnya.



Jakarta, 29, April 2009
Billahi al Tawfiq Wa al Hidayah
Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Siti Rohimah
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Survey Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: Perkembangan Politik Di Indonesia tahun 1971-2004	
A. Partai Politik Dan Masalah Demokrasi Di Indonesia.....	17
B. Perkembangan Partai Politik Islam Di Indonesia.....	31
C. Munculnya Partai Persatuan Pembangunan dan Permasalahannya.....	36
BAB III :Potret Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Sejarah	
A. Perempuan dan Partai Politik dalam Islam.....	46
B. Perempuan dan Partai Politik dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia...53	53
C. Perempuan dan Sejarah Perkembangan Undang-Undang Partai Politik Di Indonesia.....	65

BAB IV: Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan

- A. Kebijakan Partai Tentang Kepemimpinan Perempuan.....72
- B. Partai Persatuan Pembangunan dan Masalah Amendemen Undang-Undang
Partai Politik Tentang Peran Perempuan.....77
- C. Pasang Surut Serta Peran Kader Perempuan dalam Partai Persatuan
Pembangunan.....82

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan.....93
- B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

BAB II Perkembangan Politik Di Indonesia tahun 1971-2004

Tabel 1	Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971.....	21
Tabel 2	Perolehan Suara Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987.....	26
Tabel 3	Komposisi Perempuan Di Parlemen Sejak Tahun 1971-2004.....	31
Tabel 4	Pencapaian Hasil Pemilihan Umum Pada Rezim Orde Baru.....	33
Tabel 5	Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 1999.....	35
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Partai Politik Pada Pemilu 2004.....	35

BAB III Potret Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Sejarah

Tabel 7	Perempuan Di DPR Tahun 1950-2004.....	58
Tabel 8	Perolehan Kursi Lima Partai Besar Dalam Pemilu 1999.....	59
Tabel 9	Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Formal.....	60
Tabel 10	Tingkat Representasi Perempuan Di Lembaga DPR-RI.....	61
Tabel 11	Penyebaran Anggota Perempuan Dalam Komisi-Komisi Di Dpr-Ri Berdasarkan Fraksi.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah kaum yang dihormati dan dimuliakan dalam konsepsi Islam. Kaum perempuan yang sering dikenal dengan sebutan kaum hawa, secara kodrati memiliki beberapa karakteristik, di antaranya di persepsikan: secara fisik mereka lebih lemah dari pria, memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus serta seringkali menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan daripada akal pikiran, memiliki lambang kesejukan, kelembutan dan cinta kasih.¹

Dalam Realitasnya kaum perempuan masih menghadapi berbagai praktek diskriminasi di kalangan masyarakat, perempuan dianggap sebagai kelompok sosial yang sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi, itu terjadi sebagai akibat dari komunikasi sosial yang terbentuk berdasarkan paradigma maskulinitas.² Dalam Fiqih Islam misalnya, paradigma maskulinitas mendasari berbagai keputusan hukum para fukoha yang menjadi penyebab utama terbentuknya sikap diskriminatif masyarakat muslim terhadap kaum perempuan.

Terkait dengan hal tersebut, Islam dan Al-Quran menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama baik kapasitas moral, spiritual maupun intelektual. Prinsip kesetaraan dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, serta

¹Hasbi Indra dan Iskandar Ahza Husnani, *Potret Wanita Solehah* (Jakarta: Penamadani, 2005), hal.1

²Uraian tersebut dapat di lihat di pengantar buku, Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta, 2002),

menjadi jembatan bagi perempuan untuk menjadi partner bagi kaum laki-laki dan bukan lagi hanya sebagai pelayan bagi kaum laki-laki.

Dalam fakta yang penulis dapatkan, hampir semua buku sejarah baik dalam pemikiran, pergerakan politik, keagamaan, sosial, pendidikan, dan sebagainya yang banyak dimunculkan adalah peranan kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan kendatipun dalam realitas mereka mempunyai peran yang cukup signifikan akan tetapi dalam setiap peristiwa sejarah sangat jarang sekali diungkapkan.

Di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru, terhitung sejak tahun 1971 secara sistematis perempuan dikucilkan dari kehidupan politik, kebijakan yang diambil pemerintah yang selalu menempatkan perempuan didasarkan pada konsep masyarakat tradisional serta secara khusus perempuan ditempatkan pada posisi yang an-politis, dan dikukuhkan dalam panca Dharma Wanita.

Perempuan dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan kecuali hanya sebagai penyangga moral bangsa. Oleh karena itu mereka diarahkan sedemikian rupa untuk menempati posisi yang “terhormat” yaitu sebagai ibu yang baik, isteri yang baik, dan warga yang baik.

Kaum perempuan di Indonesia selama pemerintah Orde Baru secara sistematis dikucilkan dari kehidupan politik, dengan ungkapan lain telah terjadi proses depolitisasi terhadap perempuan. Sejumlah organisasi perempuan sengaja diciptakan untuk mengkooptasi mereka, seperti: PKK, Dharma Wanita, dan dharma-dharma lainnya. Organisasi-organisasi yang dihadirkan tersebut harus selalu sesuai dengan garis politik yang dirancang pemerintah sehingga menjadi

alat kontrol negara terhadap masyarakat. dan merupakan alat politik Orde Baru yang sangat mapan dan paling efektif

Dalam menjalankan semua program pemerintah saat itu, seluruh arus pembangunan diarahkan semata-mata pada dua tujuan utama yaitu; stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Selama proses pemerintahan Orde Baru, pembangunan hanya berorientasi pada aspek material dan sama sekali tidak menyentuh aspek kemanusiaan, contohnya seperti perlindungan hak-hak asasi manusia.

Selama pemerintahan Orde Baru, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara praktis untuk perempuan, dan bukan menyentuh pada kebutuhan strategis. Karena itu, tidak heran jika selama Orde Baru tidak terdengar adanya program yang berupaya mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang demokratis, termasuk di dalamnya diskriminasi terhadap perempuan.

Di Indonesia politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin, yang dimaksud dengan aktivitas maskulin adalah perilaku kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Dan dari ketiga karakteristik tersebut jika dalam diri perempuan memiliki ketiganya bagi masyarakat luas beranggapan perempuan tersebut bukanlah perempuan ideal³

Amandemen UUD 1945 (amandemen keempat) menandakan bahwa setiap warga negara laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Demikian pula dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang

³Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 1

Pemerintahan di Daerah yang menekankan pada prinsip demokrasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Partisipasi perempuan dalam seluruh proses pengambilan kebijakan publik diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan di daerah yang pada gilirannya nanti akan mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sekaligus mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya.

Sejak tahun 1945 perempuan di Indonesia sebenarnya telah mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.”⁴

Pada tahun 1950 Soerasti Karma Trimurti salah satu perempuan yang diangkat sebagai menteri, dan tahun 1955 perempuan dapat mengikuti pemilu. pada saat itu, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Jika dibandingkan dengan perempuan di Eropa, baru mendapatkan hak untuk memilih ataupun dipilih baru pada tahun 1973.

Akan tetapi perempuan bangsa Eropa dalam 20 tahun terakhir ini telah berhasil belajar berpolitik di negaranya masing-masing. Sedangkan Indonesia

⁴Khofifah Indar Parawansa, dkk, *Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah: Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia* (Jakarta: AMEPRO, 2002), hal.47

kurang menekankan pembelajaran berpolitik bagi perempuan, yang artinya Indonesia belum berhasil memberikan kesadaran politik bagi perempuan akibatnya sampai saat ini keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal masih sangat minim bisa kita ambil contoh data-data tahun 2002 dimana posisi perempuan di lembaga legislatif seperti di MPR hanya mencapai 9%, DPR 8%, DPRD di provinsi hanya mencapai 6% dan DPRD tingkat Kabupaten hanya 1%.

Selanjutnya posisi perempuan di pemerintahan semua level hanya mencapai 1,6%, kemudian pada tingkatan menteri 3,4%, dan sub-ministerial level hanya sebesar 1,3%. Lebih menarik lagi kita lihat peran perempuan di Fraksi melalui lembaga politik di DPR adalah sebagai berikut: TNI: 7,9%; PDIP 9,8%; GOLKAR 13,3%, dan PPP hanya 5,2%, dan keterwakilan perempuan pada posisi strategis di partai politik juga masih sangat minim, jumlah perempuan di Dewan Pimpinan Pusat PPP hanya 6,3%, Golkar 13,3% dan PDIP 15,4%.⁵

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam partai politik disebabkan sejumlah faktor, adapun faktor-faktor yang dimaksud ada yang bersifat ekstrem, antara lain: (1) parpol masih memiliki pandangan yang rendah terhadap perempuan dan masalah perempuan (tidak sensitif gender). (2) parpol belum intensif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya perempuan. (3) parpol masih memiliki mekanisme pembinaan kader yang memihak kepada laki-laki

Faktor lainnya adalah (4) parpol masih di dominasi pemikiran laki-laki (male domain). (5) parpol masih memberlakukan perempuan tidak lebih sebagai obyek atau alat mobilisasi massa. (6) aturan yang melarang anggota dan pengurus parpol direkrut dari PNS, sementara kebanyakan perempuan adalah anggota PNS. Dan yang terakhir (7) diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi selama ini mengakibatkan garis start yang berbeda antara laki dan perempuan.

Adapun faktor yang bersifat intern, antara lain: (1) perempuan kurang percaya diri (self confidence) karena kemampuan mereka memang terbatas. (2) perempuan kurang berusaha merebut peluang. (3) perempuan kurang mendapat dukungan, baik dari keluarga maupun masyarakatnya. (4)

⁵Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, hal. 27

perempuan masih terbelenggu oleh stereotype sebagai penjaga ranah domestic.

Faktor lain yang bersifat intern ialah: (5) perempuan masih kurang memiliki kemampuan menawar (bargaining). (6) perempuan masih terbelenggu oleh tradisi misogin. dan (7) perempuan masih terhalang oleh sejumlah pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender. Fatalnya lagi, pemahaman keagamaan yang tidak kondusif tersebut justru merupakan pemahaman mainstream di masyarakat⁶

Pembahasan singkat tentang latar belakang keterlibatan aktif perempuan dalam perjuangan dan sejarah bangsa perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena hingga saat ini penulisan sejarah Indonesia belum mendudukan secara jelas bagaimana posisi dan peran aktif perempuan dalam sejarah Indonesia, dalam literatur sejarah Indonesia perjuangan dan kontribusi yang diberikan oleh perempuan Indonesia dalam kemerdekaan serta bagaimana sumbangsih mereka dalam memperbaiki posisi perempuan sebelum dan sesudah kemerdekaan tidak menjadi fokus perhatian para sejarawan.

Maka setelah melakukan penelusuran data, penulis menemukan fakta bahwasanya dalam partai Islam peranan perempuan sangat sedikit jumlahnya, dan itu bisa kita lihat misalnya PDIP (15,4%) dan Golkar (13,3%) yang memberikan persentasi yang cukup lumayan bagi peran perempuan dalam Partai Politik, akan tetapi di PPP yang merupakan partai yang memiliki basis masa Islam hanya memberikan sedikit ruang sebesar (8%) bagi perempuan untuk berperan dalam lembaga politik formal.

Dari uraian serta analisis yang penulis uraikan di atas menjadi menarik tentunya untuk melihat dan mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana

⁶Siti Musdah Mulia, "Potret Peran Perempuan Islam Di Indonesia," Jurnal Akreditasi Harkat, Volume 4 (Tahun 2003): hal. 28-38

sebenarnya posisi serta peranan perempuan dalam politik di Indonesia pada tahun 1971 hingga tahun 2004 apakah kondisinya berbeda bahkan jauh pada saat Indonesia menjelang kemerdekaan dan pada masa awal pemerintahan Indonesia?. Maka inilah yang menjadi alasan bagi penulis mengambil tema skripsi yang berjudul **“Perempuan Dalam Partai Politik Islam (Study Terhadap Peran Perempuan Partai Persatuan Pembangunan Dalam Perpolitikan Di Indonesia {PPP} Tahun 1971-2004).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan pokok yang ingin dibahas adalah bagaimana peran kader perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Perpolitikan di Indonesia pada tahun 1971-2004. Untuk Mengkaji permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang akan penulis batasi agar penelitian serta penulisan skripsi ini tidak meluas maka penulis akan membatasi permasalahan skripsi ini sebagai berikut

1. Bagaimana Perkembangan Partai Politik Islam dalam dinamika perpolitikan di Indonesia ?
2. Bagaimana Potret Perempuan dan partai politik dalam Perspektif Sejarah?
3. Bagaimana Gambaran Peranan perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan?

Adapun rumusan masalah yang penulis hadirkan dalam penulisan skripsi ini akan memberikan 3 permasalahan yang penulis rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi partai politik Islam pada masa orde baru?
2. Bagaimana sejarah muncul dan berkembangnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta permasalahan yang terjadi?
3. Bagaimana pasang surut peranan kader perempuan di PPP ?
4. Bagaimana Kebijakan Partai Persatuan Pembangunan tentang kepemimpinan perempuan dan Amandemen UU Partai Politik tentang kuota perempuan 30%

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan yang bersifat khusus serta tujuan yang bersifat umum. Adapun tujuan yang bersifat khusus adalah:

- a. Mencari data yang akurat tentang bagaimana peranan perempuan dalam Partai Politik Islam dalam perpolitikan di Indonesia,
- b. Mendapatkan informasi bagaimana gambaran tentang kebijakan Partai Persatuan Pembangunan terhadap Peranan Perempuan dalam politik di Indonesia

Tujuan penulisan skripsi yang bersifat umum adalah:

- a. Menambah wawasan intelektual khususnya wawasan kesejarahan sosial politik bagi peran perempuan di Indonesia.
- b. Memberikan gambaran bagaimana sebenarnya posisi serta peranan perempuan di sektor politik
- c. Membantu tersosialisasinya Isu Gender dan Politik di Masyarakat.

- d. Sumbangsih karya kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta umumnya dan Fakultas Adab dan Humaniora khususnya terutama pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sejarah menurut Louis Gattschalk yaitu berupa empat kegiatan pokok (1). Pengumpulan objek data yang relevan baik secara tercetak, dan tertulis, (2). Pengolahan dan klasifikasi data dengan menyingkirkan bahan-bahan bagian yang dianggap tidak otentik, (3). Pengumpulan kesaksian yang dapat dipercaya, dan (4). Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah untuk pengkajian yang berarti⁷

Terkait empat kegiatan dalam metode sejarah tersebut, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini;

1. Pengumpulan data

Dalam tahap pertama ini penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan data baik data primer ataupun sekunder. Sumber primer yang penulis gunakan berupa buku-buku mengenai peranan perempuan seperti karya Siti Musdah Mulia yang berjudul *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengahiri Depolitisasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kibar Press, 2008, Aisyah Aminy *Demokrasi tanpa batas*. Jakarta. Lembaga Studi Pembangunan Indonesia. 2002, Irgan Chairul Mahfiz. *Nilai-Nilai Islam Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta. Social Economic Indicator. 2008, Muhammad Rodja. *PPP Problema dan Prospek*.

⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal.23-24

Jakarta: Lembaga Pengembangan Produktivitas, 1994, Hadimulyo, (ed). *Kepedulian PPP Terhadap Kaum Pekerja*. Jakarta: DPP PPP, 1996, dan sebagainya.

Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan yaitu: berupa buku karya Ani Widayani, Soetjipto. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: KOMPAS, 2005, Din Samsuddin. *Islam dan Politik era Orde Baru*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001, Abdul, Bari Azed dan Amir, Makmur. *Pemilu dan Partai politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006. Selain itu artikel, majalah dan jurnal seperti; *Jurnal Perempuan*, “Politik dan Keterwakilan Perempuan, Maret, 2004, AD Kusumaningtyas: *Pemilu 2004 menagih Komitment Partai Politik Islam Untuk Demokrasi yang berkeadilan Gender*, Edisi 34. Jakarta: YJP, 2004 dan Bambang, Eko Subiantoro. “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Masih Menjadi Kabar Burung” *Jurnal Perempuan*. Edisi 34. Jakarta: YJP, 2004..

Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Library Resarch yaitu berupa kunjungan ke beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Pusat Study Wanita (PSW) UIN Jakarta, PPIM UIN Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), dan terakhir Perpustakaan DPR/MPR RI Setelah itu data-data yang dihimpun dan diseleksi guna dijadikan rujukan utama penulis dalam memaparkan tema yang diangkat.

2. Pengolahan dan Klasifikasi data

Setelah data diperoleh maka tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasikan data-data berdasarkan permasalahan yang dibahas dimana sebelumnya dilakukan pembacaan awal terhadap sumber tersebut, data-data seperti buku, artikel, maupun jurnal, yang telah didapatkan kemudian dimasukkan sebagai data untuk tema yang penulis angkat.

3. Analisa data dan kritik Sumber

Setelah klasifikasi data dilakukan tahap selanjutnya adalah melakukan kritik sumber yaitu melalui pembacaan secara kritis terhadap sumber untuk kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif historis, metode ini merupakan suatu proses untuk mengungkapkan

fakta-fakta tentang apa, kapan, siapa, dan bagaimana. Sedangkan metode analisis berguna untuk mendapatkan implikasi peranan yang menjadi objek kajian. suatu proses analisis tersebut akan membutuhkan teori dan konsep-konsep ilmu sosial, dan antropologi sebagai alat analisisnya.⁸

4. Interview

Selanjutnya penulis juga melakukan tahap penelitian dengan menggunakan Interview dan wawancara. Interview dan wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian⁹

⁸Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 5

⁹Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta, BPEG-UII, 1977), hal. 62

5. Tahap Penulisan

Setelah seluruh tahap pengumpulan data selesai tahap terakhir adalah tahap penulisan skripsi

E. Survey Pustaka

Setelah penelusuran yang telah penulis lakukan ke beberapa perpustakaan dalam pengumpulan data baik buku, artikel, maupun jurnal yang terkait dengan tema yang akan penulis angkat, kemudian setelah dilakukan pembacaan awal serta kritik dan klasifikasi data terhadap hasil bacaan, ternyata jumlah buku, artikel, maupun jurnal tentang tema Perempuan dan Politik, tidak terlalu sulit untuk menemukan sumber-sumber tersebut, karena partai yang akan penulis angkat adalah partai Islam yang cukup memiliki basis massa yang besar serta merupakan salah satu partai tertua selain Golkar dan PDI.

Dari hasil survey keperustakaan yang penulis lakukan walaupun judul buku yang tepat untuk judul skripsi yang penulis angkat itu sedikit setidaknya ada beberapa buku yang dapat di jadikan pegangan utama penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi. di antaranya adalah:

1. Buku yang berjudul *Politik Perempuan bukan Gerhana* karya Ani Widayanti Soetjipto buku ini berisikan tentang peranan politik perempuan yang menjelaskan bagaimana jatuh banggunya gerakan perempuan Indonesia pada batasan tahun 1999-2004 dalam meningkatkan representasi politik perempuan
2. Buku yang berjudul *Menuju Kemandirian Politik Perempuan Upaya Mengahiri Deploitisasi Perempuan Di Indonesia* karya Siti Musdah Mulia.

Dalam buku ini di jelaskan bahwa hingga menjelang pemilu 1999 perempuan masih buta akan politik itu diakibatkan atas depolitisasi yang sengaja dan sistemik dimana dalam pandangan perempuan dunia politik adalah dunia maskulin yang kotor dan kejam selain itu perempuan belum mengerti akan demokrasi dan pentingnya institusi Pemilu

Kemudian beliau juga mengatakan pendidikan politik perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana Pengalaman ril yang dirasakan oleh hampir semua perempuan di Indonesia yang terdepolitisasi dalam politik itu terkumpul dalam tiga isu yaitu keterwakilan perempuan dalam ruang publik yang sangat rendah, komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses yang memadai bagi kepentingan perempuan, dan masih kuatnya kendala struktural nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki.

3. Buku yang berjudul *Perempuan dan politik* karya Siti Musdah Mulia dan Anik Farida menjelaskan bahwa dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan saat menghadapi posisi kepemimpinan perempuan mengalami lebih banyak hambatan dibandingkan dengan laki-laki, itu dikarenakan perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan

Kemudian dalam buku ini juga mereka menghadirkan beberapa tokoh-tokoh perempuan yang mengalami serta berkecimpung dalam politik bagaimana sejarah panjang jatuh dan banggunya mereka selama berperan

dalam partai politik dalam buku ini juga menawarkan solusi tentang berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan dalam peran mereka dalam politik.

4. Buku karya Muhammad Rodja dengan judul *PPP Problema dan Prospek*.

Dalam buku ini dijelaskan tentang problematika yang dihadapi oleh PPP di pentas politik Nasional. Dan dalam buku ini juga menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Rodja yang merupakan kristalisasi dari pengalaman beliau sebagai politikus dalam Partai Persatuan Pembangunan dengan tujuan memperkenalkan PPP lebih dalam.

Pemikiran yang eksklusif dalam buku ini adalah pemahaman juridis terhadap makna yang mengandung slogan “ kembali ke Khitah 1926 “NU,

Pemikiran eksklusif tersebut mengantarkan kesimpulan yang kontras dengan pendapat umum selama ini. Eksklusifitas juga terlihat dari konsep penulis tentang pola pengembangan PPP di masa mendatang yang terumus dalam konsep titik tumbuh partai

Dalam buku ini juga terlihat bahwa penulis sangat berupaya keras untuk menjunjung objektivitas, namun dalam beberapa hal dalam buku ini tidak seluruhnya sikap jujur pertahankan di dalamnya karena sentimen dan girah terhadap organisasi

5. Buku Aisyah Aminy *Demokrasi Tanpa Batas*. Dalam buku ini menjelaskan tentang gambaran langkah perjalanan dan, perjuangan, serta pemikiran Aisyah Aminy dalam pergulatannya di tengah-tengah dinamika organisasi dan perpolitikan nasional

6. Yang terakhir adalah buku tentang *Politik Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* di mana dalam buku ini berisikan tentang pertanggung jawaban Partai Persatuan Pembangunan kepada kader dan partisipannya di seluruh penjuru tanah air tentang perjuangan dan sikap politik partai pada sidang tahunan MPR RI tahun 2000

F. Sistematika Penulisan.

Dalam sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan adalah membagi ke dalam lima (5) BAB yaitu;

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, survey pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang bagaimana Perkembangan Politik Di Indonesia tahun 1971-2004 yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu; Partai Politik dan Masalah Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Partai Politik Islam Di Indonesia, dan yang terakhir yaitu Munculnya Partai Persatuan Pembangunan dan Permasalahannya.

BAB III:: Penulis akan membahas tentang Potret Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Sejarah yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu; Perempuan dan Partai Politik dalam Islam, Perempuan dan Partai Politik dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia. dan yang terakhir adalah Perempuan dan Sejarah Perkembangan Undang-Undang Partai Politik Di Indonesia.

BAB IV: Penulis akan membahas tentang Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu: Kebijakan

Partai Tentang Kepemimpinan Perempuan. Partai Persatuan Pembangunan dan Masalah Amandemen Undang-Undang Partai Politik tentang peran Perempuan, dan yang terakhir Pasang Surut serta Peran Kader Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan.

BAB V: Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang merupakan kesimpulan atas seluruh pembahasan skripsi, yang diharapkan dapat menemukan data serta fakta terkait dengan peran perempuan dalam partai politik hambatan serta pengaruh perempuan dalam partai serta mencari solusi untuk meningkatkan peran perempuan dalam partai politik di Indonesia.



BAB II

Perkembangan Politik Di Indonesia Tahun 1971-2004

A. Partai Politik Dan Masalah Demokrasi Di Indonesia.

Demokrasi sesungguhnya bukan suatu hal yang baru dalam terminologi politik di Indonesia. Konsep demokrasi sudah didengungkan jauh sebelum zaman pergerakan. Sejarah mencatat bahwa pergolakan telah muncul di berbagai daerah di Indonesia, karena itu sebenarnya secara spirit demokrasi merupakan bagian yang melekat pada diri bangsa Indonesia.¹⁰

Era Orde Baru dan perkembangan ekonomi yang cepat ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan dalam proses demokratisasi politik, dalam perkembangannya demokrasi telah menjadi kebutuhan, demikian pula dengan sistem politik orde baru yang otoriter juga tidak mampu bertahan. Karena kerentanan tatanan ekonomi yang ada semakin mempercepat jatuhnya sistem politik orde baru. Krisis ekonomi dan politik kemudian menjadi pemicu semakin cepat jatuhnya rezim politik orde baru.

Proses demokrasi politik di Indonesia tidak lepas dari bagaimana peran partai politik di dalamnya di mana partai politik merupakan salah satu dari sistem demokrasi politik. Partai politik mempunyai peran penting dalam negara demokrasi banyak ilmuwan politik mensyaratkan bahwa dalam sebuah negara yang demokratis harus memiliki partai politik dan melaksanakan pemilihan umum

¹⁰Irgan Chairul Mahfiz, *Nilai-Nilai Islam Demokrasi dan Keadilan* (Jakarta: Social Economic Indikator {SEI}, 2008), hal. 3

(pemilu) yang teratur, karena tanpa keduanya sebuah negara tidak akan pernah disebut sebagai negara demokrasi¹¹.

Partai Politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokrasi, karena itu partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan dalam pemilihan seperti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gabriel A Almond seorang ilmuwan politik menjelaskan partai politik memiliki tujuh Fungsi yaitu:

1. *Sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam kehidupan politik*
2. *Sebagai sarana partisipasi dan mobilisasi masyarakat dalam aktivitas politik.*
3. *Sebagai sarana rekrutment untuk mempersiapkan elite-elite yang akan menduduki jabatan-jabatan politik.*
4. *Sebagai sarana komunikasi politik*
5. *Sebagai sarana aktualisasi kepentingan*
6. *Sebagai sarana agregasi kepentingan yaitu menyampaikan tuntutan rakyat dengan mengemukakan sejumlah alternatif kebijakan, dan*
7. *Sebagai sarana perumusan kebijakan¹²*

Uraian pada bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran awal tentang Islam dan politik seperti di ketahui bahwa, mengaitkan antara Islam dan politik di Indonesia merupakan hal yang sangat esensial dan bahkan krusial, mengingat agama Islam adalah agama yang dominan dianut dalam masyarakat Indonesia karena Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan sendiri serta memperlihatkan keragaman yang homogen.

Dalam perjalanan politik Islam di Indonesia diawali dengan berkembangnya organisasi Islam moderen, seperti; Sarekat Dagang Islam yang mengkonsentrasikan pada bidang ekonomi dan perdagangan, Boedi Oetomo yang

¹¹Irgan Chairul Mahfiz, *Nilai-Nilai Islam Demokrasi dan Keadilan*, hal.24

¹²Irgan Chairul Mahfiz, *Nilai-Nilai Islam Demokrasi dan Keadilan*, hal.24-25

berkonsentrasi pada pendidikan, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama yang berkonsentrasi pada kesejahteraan umat yang akhirnya dua organisasi tersebut aktif dalam politik dan mewarnai peta umat Islam hingga sekarang. Karena itu dari sejarah terlihat bahwa berdirinya lembaga sosial keagamaan Indonesia merupakan fenomena khas umat Islam di Indonesia.¹³

Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan gerakan nasional Indonesia dan revolusi anti kolonial, kelompok sosial-politik yang beragam mulai bermunculan sepanjang awal dekade pemerintahan mulai dari rezim Parlemerter hingga masuknya Orde Baru, di mana kelompok tersebut hadir dari hasil proses dialektis Indonesia abad-20.

Dalam perjalanannya, partai politik Islam di Indonesia mulai masa Orde Lama hingga akhir rezim Soekarno tidak mendapatkan posisi yang strategis di dalam pemerintahan, karena sistem pemerintahan Soekarno yang presidential dan menetapkan NASAKOM sebagai dasar pemikiran yang diciptakan olehnya untuk membangun negara yang Ideal.

Setelah jatuhnya rezim Soekarno para pemimpin Islam menyiapkan langkah-langkah yang memungkinkan politik Islam memainkan peran yang lebih signifikan dalam rezim selanjutnya. Di mana mereka mempunyai kesempatan politik untuk mencapai cita-cita Islam, terlihat dari beberapa pemimpin Islam yang mencoba mendirikan partai-partai Islam baru seperti Muhammad Hatta yang mencoba mendirikan lagi partai Islam baru yaitu Partai Demokrasi Islam

¹³A.M Fatwa, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas Di Tengah Pluralitas* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 9

Indonesia (PDII), dan juga Muljadi Djojomarto berusaha menghidupkan kembali partai Islam Indonesia (PII)¹⁴

Lahirnya rezim Orde Baru setelah peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto tanggal 11 Maret 1965 melahirkan optimisme besar bagi pendukung Amal Muslimin, mereka percaya akan mampu mendirikan partai politik Islam baru tetapi keinginan tersebut hilang ketika ABRI pada tanggal 21 Desember 1966 mengeluarkan pernyataan yang menyamakan Masyumi dengan PKI karena telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 serta ABRI pun menyatakan bahwa akan menindak tegas setiap individu atau kelompok yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.¹⁵

Konflik antara kepemimpinan militer (ABRI) dengan politik Islam (Partai Islam) dipandang dari beberapa aspek yaitu; agama, budaya, dan politik. Di samping pernyataan ABRI atas Masyumi yang bersimpati pada pemberontakan PRRI pembentukan politik Islam yang terorganisasi akan menjadi tantangan terhadap rezim baru dan kepentingan militer

Referensi strategis penolakan Soeharto, Pancasila dan UUD 1945 bahwa mereka berkeyakinan berada dalam bahaya, membuat mereka tetap berhati-hati terhadap PNI dan NU di karenakan pada masa rezim Orde Lama kedua partai ini merupakan partai yang tidak puas terhadap pancasila. Khususnya NU yang menginginkan pancasila dan piagam Jakarta.

¹⁴PII adalah partai yang dulunya sempat didirikan oleh pemimpin-pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1938 yang menghilang setelah Masyumi berdiri, akan tetapi niat mereka untuk itu di urungkan dan tidak terlaksana..

¹⁵Din Syamsuddin, *Islam dan Politik era Orde Baru* (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2001), hal.35

Pada awal masa Orde Baru hanya ada tiga partai Islam yang bertahan yaitu NU, PSII, dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), pembentukan Parmusi¹⁶ saat itu diharapkan memberikan sesuatu yang baru bagi politik Islam karena Parmusi dipandang mewakili aspirasi politik Islam modernis. Menghadapi pemilu tahun 1971 ada upaya pemerintah membantu GOLKAR memenangkan pemilu saat itu. Persiapan dan strategi yang efektif membuat GOLKAR menang dalam pemilu tersebut mengalahkan partai-partai lainnya. Lihat tabel di bawah ini;

Tabel 1
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971.¹⁷

Partai	Pemilih	%	Kursi	\$
GOLKAR	34. 348.673	62.80	336	730
NU	10. 213. 550	18.67	58	126
PNI	3.793.650	6.94	20	4,3
Parmusi	2.930. 746	5.36	24	5.2
PSII	1.308. 237	2.39	10	2.1
Parkindo	733. 359	1.34	7	1.5
Partai Katolik	603. 740	1.10	3	0.6
Perti	381. 309	0.70	2	0.4
IPKI	338. 403	0.62	-	-
Murba	48.126	0.09	-	-
Jumlah	54. 699. 509	100.00	460	100.00

Seperti di tunjukan pada tabel 1 di atas GOLKAR menang dengan merebut 62.80 % dari total suara dan meraih 336 kursi di Dewan perwakilan Rakyat dengan tambahan 100 kursi dari anggota yang diangkat, sedangkan partai-partai

¹⁶Cikal bakal Parmusi adalah Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM), yang pembentukannya diprakarsai oleh ormas-ormas pendukung Masyumi, yaitu Wanita Islam, Gasbindo, HMI, Al- Washliyah dan KBIM (waktu itu anggota Sekber GOLKAR), yang dibentuk pada tanggal 16 Desember 1965 dan ketuanya adalah Letjen (pur) Soedirman, (DPP Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat* (Jakarta: DPP PPP, 2003). ha. 1 13)

¹⁷Din Syamsuddin, *Islam dan Politik era Orde Baru*, hal. 4

Islam pada pemilu tahun 1971 menghasilkan 58 kursi di lembaga perwakilan untuk NU, Parmusi 24 kursi, PSII mendapatkan 10 kursi, Perti 2 kursi.¹⁸

Rezim Orde Baru menyadari restrukturisasi politik. Untuk itu langkah awal yang dilakukan Orde Baru ialah menyederhanakan struktur kepartaian baik dari segi jumlah, pola dukungan, hasil massa, maupun aliran serta Ideologi yang dianut oleh partai-partai¹⁹ Langkah awal yang dilakukan untuk kearah itu ialah melalui ketetapan MPRS no 22/1966 tentang pengaturan kembali srtuktur politik, hingga pada akhirnya penyederhanaan diawali melalui fusi menjadi dua fraksi yang ada di DPR pada bulan Maret 1970 yaitu kelompok Demokrasi Perjuangan dan kelompok persatuan Pembangunan²⁰ Sedangkan Golkar merupakan kelompok yang disponsori penuh berdirinya dan menjadi alat kekuatan pendukung pemerintahan Soeharto.

Selanjutnya di dorong oleh kemenangan besar GOLKAR pada pemilu 1971, pemerintah melalui operasi khusus mempercepat program penyederhanaan partai politik yaitu dengan mendesak sembilan partai politik termasuk partai politik Islam yang saat itu mengikuti pemilu tahun 1971 untuk menjadi tiga organisasi kekuatan politik masing-masing yaitu; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari empat partai Islam, PDI dengan fusi dari empat partai nasionalis, dan GOLKAR sendiri sebagai transformasi dari sekber GOLKAR.

¹⁸Mahrus Irsyam, *Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis* (Jakarta: Yayasan Penghidmatan, 1984), hal. 46

¹⁹Zainal, *Peta Islam Politik*, hal. 158

²⁰Yang dimaksud dengan kelompok Demokrasi Pembangunan adalah Partai PNI, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Sedangkan kelompok Persatuan Pembangunan terdiri dari partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

Dengan hasil kemenangan Golkar pada pemilu 1971 membuat pemerintah percaya diri untuk menetapkan upaya merestrukturisasikan partai politik, dan upaya lainnya adalah ingin melanjutkan kepercayaan diri di kalangan partai yang ada terhadap kemampuan mereka untuk lebih lama mempertahankannya. Usaha yang dilakukan Soeharto ialah dengan cara membuat dewan pimpinan partai tandingan jika hasil musyawarah ataupun muktamar partai pimpinan umumnya dianggap oposan terhadap pemerintah.

Melalui fraksi-fraksi di DPR telah dimulai proses memfusikan parpol-parpol ke dalam wadah baru. NU, Parmusi, PSII dan Perti membentuk gabungan yang diberi nama kelompok spiritual yang meupakan motor penggerak terciptanya fusi dari keempat partai tersebut ke dalam PPP. Suasana persahabatan yang tercermin

dalam munas Dewan Partai yang memutuskan bahwa pertimbangan kekuatan yang diperoleh masing-masing unsur partai dalam pemilu 1971 tetap dijadikan kriteria untuk membagi distribusi kekuasaan, keputusan munas tersebut disebut “Konsensus 1975” atau status quo dalam distribusi kekuasaan antar unsur dalam PPP²¹

Dalam perjalanan pemilu tahun 1977, PPP memperoleh 99 kursi di DPR, hal tersebut menunjukkan PPP berhasil memperoleh tambahan 5 kursi dari hasil pemilu sebelumnya tahun 1971. melalui hasil konsensus tahun 1973 NU yang memperoleh 58 kursi pada pemilu 1971 justru berkurang 2 kursi menjadi 56 kursi, sedangkan 2 kursi ditambah dengan 5 kursi yang merupakan hasil pemilu 1977

²¹Mahrus, Ulama dan Partai Politik ,hal.46

didistribusikan ke dalam unsur unsur lainnya dalam PPP yaitu; MI mendapat tambahan didistribusikan 1 kursi, SI 4 kursi, perti 2 kursi.

Kurangnya distribusi kekuasaan yang diperoleh NU dan kecilnya distribusi yang diperoleh MI berkaitan dengan kekuasaan d DPR, NU mendapatkan posisi yang politis yang mengandung arti gengsi dan simbolis, yaitu wakil ketua MPR/DPR, sedangkan MI mendapatkan posisi politis sebagai wakil ketua DPR komisi /VII. Dari peristiwa yang terjadi antara NU dan MI di dalam unsur PPP dapat ditangkap adanya persaingan antara keduanya.

Konflik internal yang terjadi di PPP bemula dari penyusunan pengurus dalam DPP PPP di bawah kepemimpinan Naro dengan dicantumkannya personil yang mayoritas untuk MI sebanyak 23 orang, sedangkan personil dari NU menjadi jumlah yang minoritas dengan jumlah 12 orang, sehingga Abdurahman Wahid mengeluarkan pernyataan “ NU kali ini babak belur”²²

Kekecewaan berlanjut dengan tidak adanya kesepakatan antara MI dan NU hingga daftar calon PPP untuk pemilu 1982 mencapai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah tidak juga diselesaikan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud mengadakan konsultasi dengan wakil-wakil dari setiap unsur di PPP secara terpisah.

Setelah batas waktu penyerahan daftar calon bagi PPP di perpanjang memberikan kesempatan Naro untuk mengambil jalan pintas dalam penyusunan calon dan nomor urut masing-masing calon untuk PPP tanpa berkonsultasi dengan unsur-unsur lainnya yang ada dalam PPP. Dalam daftar yang diserahkan Naro

²²Muhammad Rodja, *PPP Problematika dan Prospek* (Jakarta: Lembaga Perkembangan Produktivitas, 1994), hal. 67

tokoh-tokoh NU tergeser ke nomor-nomor urut bawah sehingga sangat kecil kemungkinan mereka terpilih. Tercatat 29 tokoh NU yang turun peringkatnya ke nomor mustahil bahkan tercoret dari daftar calon Legislatif.²³

Kekecewaan NU direalisasikan dengan melayangkan surat protes atas tindakan Naro ke DPP PPP dan LPU melalui surat bernomor 2491/B.II/02.b/81 tertanggal 6 november 1981 dengan ditandatangani oleh Ketua Umum PB NU K.H. Idham Chalid dan Sekjen PB NU H.M. Munasir, akan tetapi surat protes tersebut tidak ditanggap oleh LPU karena LPU hanya akan menanggapi kepada PPP bukan unsur lain.

Selanjutnya LPU mengeluarkan surat bernomor 440/15/XI/1981 yang ditandatangani Sekretaris LPU R. Soeprapto yang berisikan pernyataan bahwa “

*Daftar calon yang memuat nomor urut calon anggota DPR untuk PPP yang disampaikan pada Mendagri/ ketua LPU oleh ketua umum PPP J. Naro pada tanggal 27 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum”.*²⁴

Konflik yang terjadi dalam tubuh PPP membawa NU dalam muktamar ke XXVII NU nomor 02/MNU-27/1984 alinea terakhir yang berbunyi

*“Nahdatul Ulama dan kehidupan berbangsa setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal warga NU menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggungjawab sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama”.*²⁵

Hasil muktamar NU yang ke 27 memutuskan beberapa poin yang salah satunya adalah kembalinya NU ke Khitah 1921.

²³Mahrus, *Ulama dan Partai Politik*, hal. 61

²⁴Muhammad Rodja, *PPP Problematika dan Prospek*, hal 69-70

²⁵Muhammad Rodja, *PPP Problematika dan Prospek*,hal 104

Kekecewaan yang terus-menerus, serta keputus asaan dalam permasalahan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh PPP sehingga salah satu unsur dari PPP yaitu NU memutuskan untuk keluar dan kembali ke Khittah 1921, serta bersamaan dengan citra sebagai partai Islam telah membawa PPP pada proses kemerosotan ini dengan jelas tergambar dalam perolehan suara pada tiga pemilu terakhir.

Tahun 1977. PPP memperoleh suara 29.29%, tahun 1982 memperoleh suara yang menurun yaitu 2.78% dan terakhir merosot tajam pada pemilu 1987 PPP memperoleh suara hanya 18.8% dikarenakan pada pemilu tahun ini pemimpin NU menyerukan pada semua warganya agar tidak memilih PPP dengan cara yang moderat mereka berpendapat bahwa memilih Golkar, atau PDI tidaklah haram²⁶ dari hasil instruksi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh NU, banyak kader NU yang memilih Golkar dan juga PDI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perolehan suara pada pemilu tahun 1977, 1982, dan 1987 yang terlihat bagaimana dinamika perolehan suara yang diraih oleh PPP di 3 kali pemilu tersebut di bawah ini;

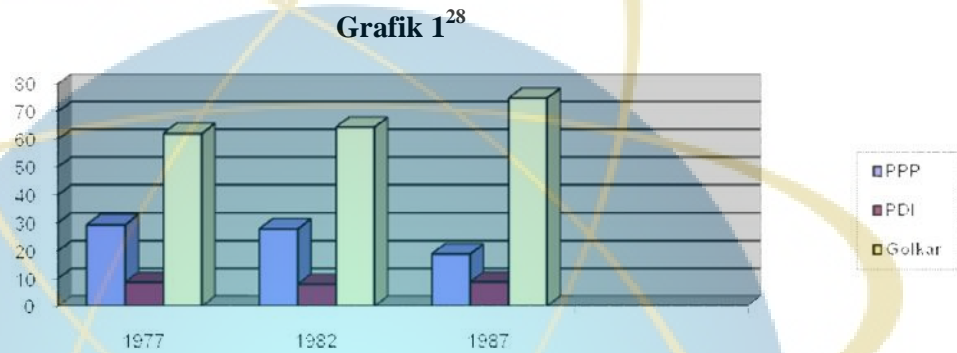
Tabel 2
Perolehan suara Pemilu tahun 1977, 1982, 1987²⁷

Kostestan	1977	%	1982	%	987	%
PPP	18.743.491	28,3	20.871.80	27,8	13.701.428	18,8
GOLAKAR	39.750.096	62,1	48.334.724	64,3	62.783.680	74,8
PDI	5.504.751	8,6	9.324.708	7,9	9.324.708	8,7
Total	63.998.338	100	75126.308	100	85.809.816	100

²⁶Data dari Lembaga Pemilihan Umum, *Daftar Pembagian Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat* (Jakarta 1977, 1982, 1987).

²⁷Din Syamsuddin, *Islam dan Politik era Orde Baru*, hal. 39

Dari data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan PPP dalam 3 tahun pemilihan umum, mengalami kemerosotan khususnya pada tahun 1987 dibandingkan dengan 2 partai politik lainnya. Untuk lebih jelas bagaimana dinamika pemilu 3 tahun yang tergambar dalam tabel di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini²⁸



Di Indonesia, pada masa Demokrasi Parlementer, partai politik dan organisasi perempuan dapat tumbuh dan hidup, periode ini, partai politik mampu menyalurkan aspirasinya. Namun, kebebasan ini mengalami defisit pada saat diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, di mana jumlah parpol dikurangi, termasuk juga orpol/ormas perempuan.

Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pancasilanya, secara langsung maupun tidak, mengakhiri kemandirian partai politik, orpol/ormas perempuan. Pemerintah Orde Baru, sebagai antitesisnya membentuk organisasi perempuan yang terkait dengan birokrasi kekuasaan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, yang sifatnya tidak mandiri. Satu-satunya organisasi perempuan yang diakui adalah Kowani yang dalam perkembangannya menjalankan fungsi-fungsi sosial.

Setelah penulis membahas perjalanan parta Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru, selanjutnya penulis akan sedikit membahas gerakan reformasi yang

²⁸Din Syamsuddin, *Islam dan Politik era Orde Baru*, hal. 43

telah berhasil menumbangkan rezim Soeharto menjadi bagian dari episode sejarah demokrasi di Indonesia.

Berbeda dengan partai islam di masa Orde Lama dan Orde Baru, partai Islam di era Reformasi tidak mudah diidentifikasi, pada masa Orde Lama partai Islam mudah dikenali, dari namanya seperti Masyumi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Meskipun nama masyumi yang didirikan setelah Indonesia merdeka tidak memiliki kepanjangan, tetapi pada masa Jepang Masyumi merupakan kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia.²⁹

Sejarah perjuangan umat Islam di era Orde Baru nampaknya mengalami kelanjutan dalam era Reformasi termasuk dalam pendirian partai politik. Selain melahirkan reformasi tatanan politik dan moral baru dalam perpolitikan, juga melahirkan polarisasi dan fragmentasi politik Islam. Salah satunya adalah munculnya wacana kebangsaan dalam manifesto kepartaian.

Dalam hal ini, politik Islam tidak lagi didefinisikan hanya dalam bentuk formalisme kekuatan politik formal seperti partai yang berideologi Islam, melainkan sejauh mana nilai-nilai agama atau Islam berhasil menjadi sumber inspirasi dalam wacana demokratisasi. Dalam partai Islam di era Reformasi terdapat dua kategori partai politik yaitu partai Islam dan partai berbasis massa Islam.

Terkait dengan Partai Islam dan Partai yang berbasis masa Islam Azyumardi Azra berpendapat³⁰ “Partai dapat dikatakan Islam apabila partai

²⁹Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grahitipress 1987), hal. 26-79

³⁰Jurnal Perempuan, *Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Jilid 34 (Jakarta: YJP,2004), hal.34

tersebut menggunakan agama Islam sebagai idiologi Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Sedangkan partai yang berbasis masa Islam adalah Partai yang menggunakan Pancasila sebagai dasar idiologi serta pengurus dan basis masanya kebanyakan muslim. Seperti: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN)”.

Sementara itu, masa Reformasi, dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.³¹

Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, termasuk perempuan, karena demokrasi tanpa melibatkan perempuan, sudah pasti bukan demokrasi yang sesungguhnya

Tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999, ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu. Pada Pemilu 1999 tersebut, untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan juga dikedepankan dalam kampanye pemilu yang berlangsung.

Hasil Pemilu 1999, mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), mendapat suara terbesar dalam Pemilu. Namun, jika melihat capaian kuantitatif, komposisi parlemen hasil

³¹Data dari <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/04/26/pejuang-keterwakilan-perempuan-dalam-lembaga-politik-di-indonesia/>

Pemilu 1999 ini, jelas merupakan kemunduran, karena minimnya representasi perempuan, yang hanya mencatat angka 9%.

Pada persiapan Pemilu 2004, berbagai gerakan affirmative action kembali dilakukan oleh aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu puncaknya, meski bukan yang terbaik dari perjuangan ini adalah pada saat parlemen mengesahkan dua undang-undang politik, yaitu UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilu.

Dalam dua undang-undang ini tercantum klausul mengenai tindakan affirmative untuk perempuan. UU No. 31/2002, walaupun tidak secara spesifik mencantumkan angka 30%, tetapi dalam penjelasan Pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan Gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.

UU No. 12/2003 tentang Pasal 65 (1) secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, segala kebanggaan gerakan affirmative action dengan berhasil diputuskannya dua undang-undang tersebut, namun hasil Pemilu Legislatif 2004 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, dibanding dengan hasil pemilu sebelumnya.

Berikut ini adalah gambaran pemilu pada tahun 1971-2004 yang tidak beranjak secara signifikan dilihat dari komposisi perempuan di parlemen dibandingkan dengan komposisi laki-laki dalam parlemen:

Tabel 3

Komposisi Perempuan Di Parlemen Sejak Tahun 1971-2004³²:

No	Periode	Perempuan	%	Laki-laki	%
1.	1971-1977	36	7,8%	460	92,2%
2.	1977-1982	29	6,3%	460	93,7%
3.	1982-1987	39	9,5%	460	91,5%
4.	1987-1992	65	13%	500	87%
5.	1992-1997	63	12,5%	500	87,5%
6.	1997-1999	54	10,8%	500	89,2%
7.	1999-2004	46	9%	500	91%

B. Perkembangan Partai Politik Islam Di Indonesia

Pada masa Orde Baru perkembangan politik berlangsung dengan sentralisasi kekuasaan pada elit penguasa, atau lebih jelasnya pada kantor Kepresidenan dan kelompok intinya, banyak pengamat politik Indonesia melihat ini sebagai refleksi dari paham kekuasaan Jawa, karena mayoritas elit politik pada saat itu berbudaya Jawa.

Sebagai alat politik perkembangan otoritarianisme militer dengan mengatasnamakan stabilitas Nasional telah membatasi partisipasi politik di satu pihak dan dipihak lain para pemimpin partai-partai politik sipil tidak mampu mendapatkan dukungan dari massa untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh. Ketidakmampuan para elit politik terlihat jelas ketika mereka cenderung mencari dukungan dari elit yang berkuasa untuk mengamankan posisi mereka sendiri di

³²Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: KOMPAS, 2005), hal. 239.

dalam partai yang mereka pimpin daripada berusaha memainkan posisi melalui dukungan para pengikutnya.

Rekayasa politik yang dijalankan rezim Orde Baru melalui pembatasan jumlah partai politik, demi stabilitas nasional rezim militer menolak setiap bentuk politik kerakyatan dengan ini saat pembentukan Golongan karya yang merupakan gabungan kelompok militer, agama, pemuda, buruh, pengusaha, dan kelompok-kelompok non-ideologis lainnya dengan nama Sekretariat Bersama GOLKAR (Sekber GOLKAR).³³

Setelah hasil Pemilihan Umum tahun 1971 yang membawa GOLKAR memiliki kemenangan besar akhirnya pemerintah melalui operasi khusus mempercepat program penyederhanaan partai politik dengan mendesak sembilan partai politik yang menjadi peserta Pemilu 1971 untuk menjadi tiga organisasi kekuatan politik, masing-masing partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan hasil fusi dari empat partai Islam, PDI yang merupakan hasil fusi dari empat Partai Nasionalis, dan GOLKAR sendiri sebagai Transformasi dari sekber GOLKAR.

Banyak pengamat politik yang menilai penyederhanaan partai politik ini mempunyai tujuan depolitisasi masyarakat yang berimplikasi pada berkurangnya independensi kegiatan politik masyarakat, baik melalui pengurangan peran organisasi otonomi maupun dengan mengkooptasinya ke dalam proses

³³Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, hal. 40

demokratisasi, ini jelas terlihat dalam sebuah organisasi Payung yang pro pemerintah.³⁴

Selama perjalanan partai politik pada rezim Orde Baru yang didominasi oleh militer yang tidak menginginkan adanya perbedaan pendapat dimana adanya kecenderungan birokrasi yang berlebihan, pada rezim ini terdapat kecenderungan kearah “Caudilisme” yaitu rezim-rezim militer yang menghalangi perkembangan proses demokratisasi, dimana ini terlihat dari peran social-politik ABRI yang terus meningkat dari hari ke hari lebih-lebih menjelang pemilihan umum tahun 1977 dan di setiap pemilihan umum selanjutnya.

Dari hasil kebijakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang telah dijelaskan di atas demi terwujudnya stabilitas nasional dengan memperkecil jumlah partai politik nampak usaha pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam satu keputusan yang sangat birokratik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari pencapaian partai pemerintah pada tiap-tiap pemilihan umum sepanjang masa Orde Baru dalam table berikut ini;

Tabel 4
Pencapaian Hasil Pemilihan Umum pada rezim Orde Baru.³⁵

No	Partai	1971	1977	1982	1987	1992
1.	GOLKAR	236 (62,8%)	232 (62,11%)	237 (64,30%)	299 (74,7%)	282 (70,5%)
2.	PPP	94 (29,12%)	99 (29,9%)	94 (27,8%)	61 (15,3%)	62 (15,5%)
3.	PDI	30 (9,39%)	29 (7,9%)	29 (7,9%)	40 (10^%)	56 (14%)

³⁴Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, hal. 42

³⁵M. Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan “Islam Politik” Di Indonesia Era 1970-an-1980-an* (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1999), hal; 99

Dari data di atas rata-rata pencapaian suara dalam lima kali pemilihan umum untuk tiap-tiap partai adalah 66,9% (GOLKAR), 23,5% (PPP), dan 9,9% (PDI), Kemenangan luar biasa GOLKAR dalam pemilihan umum pertama Orde Baru memang telah membuka peluang partai tersebut untuk melakukan perancangan politik sesuai dengan yang diinginkannya,

Hasil kemenangan GOLKAR dalam setiap pemilihan umum disebabkan karena GOLKAR dibiayai oleh negara melalui Pertamina, Perusahaan Negara, dan pengusaha Cina yang telah menandatangani “Kontrak” oleh Negara, Menurut Turmudhi kemenangan Golkar ditopang oleh jaringan birokratik pemerintah untuk memobilisasi massa.

Dari uraian di atas dapat penulis ambil kesimpulan partai politik pada masa Orde Baru mengalami stagnasi perkembangan politik, itu disebabkan karena pemerintah rezim Orde Baru menetapkan kebijakan-kebijakan yang berlangsung dengan sentralisasi kekuasaan pada elit penguasa, dan sistem politik Indonesia Orde Baru telah berkembang begitu cepat.

*Istilah rezim ini telah berkembang menjadi 18 macam yaitu; Negara Integralistik, Negara pasca Kolonial, Neo Partimordialisme, otoriter birokratik, renteantoritorial birokratik, kapitalis birokratik, birokratik otoriter korporatis, Negara birokratik jawa, Autokrasi Presiden, Negara tentara renternir, Negara Teknokratik, Negara Hibrida, Negara diktator Tentara yang murni, dan demokrasi terpimpin berkonstitusi.*³⁶

Selanjutnya era Reformasi melahirkan banyak partai politik baik yang berlabel agama maupun yang nonagama. Keberadaan partai politik dalam Negara merupakan salah satu institusi dari demokrasi, Dalam pemilu 1999 dan 2004,

³⁶M. Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan “Islam Politik” Di Indonesia Era 1970-an-1980-an*, hal. 100-102

banyak partai politik Islam yang bermunculan baik partai yang berasaskan Islam, maupun partai yang berbasis massa Islam.

Reformasi juga merupakan era yang demokratis yang sebenarnya di Indonesia, di mana semua warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan di pilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Berikut adalah table hasil perolehan suara pada pemilu tahun 1999 dan 2004 dan perbandingan perolehan kursi antara laki-laki dan perempuan dalam DPR hasil pemilu 1999 dan 2004

Tabel 5
Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 1999

No	Partai Politik	Persentase
1.	PDI-P	33,7%
2.	GOLKAR	22,1%
3.	PKB	12,6%
4.	PPP	10,7%
5.	PAN	7,1%
6.	PBB	1,9%
7.	PKS	1,4%

Tabel 6
Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Partai Politik pada Pemilu 2004³⁷

No	Partai Politik	Perempuan	%	Laki-laki	%	Total
1.	Golkar	18	14	109	86	128
2.	PDI-P	12	11	97	89	109
3.	PPP	3	5,17	55	94,82	58
4.	Demokrat	6	10,52	51	89,47	57
5.	PKB	7	13,46	45	86,53	52
6.	PAN	7	13,46	45	86,53	52
7.	PKS	3	6,66	42	93,33	45
8.	PBR	2	15,38	11	84,61	13

³⁷Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, hal. 268

9	PDS	3	25	9	75	12
10.	PBB	0	0	11	100	11
11.	PPDK	0	0	5	100	5
12.	PKPB	0	0	2	100	2
13.	P. Pelopor	0	0	2	100	2
14.	PKPI	0	0	1	100	1
15.	PNBK	0	0	1	100	1
16.	PNI Marhaenies me	0	0	1	100	1
	Total	61	11	489	89	550

Dari tabel di atas pada pemilu 1999 dan 2004 terlihat partai Islam walaupun sudah terpecah menjadi beberapa partai, akan tetapi dalam prolehan suara tidak memiliki hasil yang signifikan. Sangat jelas terlihat bahwa dalam pemilu 1999 partai Nasional yang memperoleh suara yang besar seperti PDI-P meraih 33,7%, GOLKAR 22,1% dan selanjutnya partai Islam yang hanya meraih setengah dari perolehan suara PDI-P dan GOLKAR.

C. Munculnya Partai Persatuan Pembangunan dan Permasalahannya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir di saat penguasa Orde Baru sedang melakukan konsolidasi kekuatan setelah berhasil menumbangkan kekuasaan Soekarno tahun 1976. Kepemimpinan politik pada masa Orde Baru merupakan gabungan dari koalisi besar yang terdiri atas kaum intelektual, kelompok teknokrat, dan militer TNI AD yang bertindak sebagai tulang punggung kekuatan negara

Untuk membangun perekonomian tersebut, diperlukan sebuah kestabilan politik. Orde Baru merupakan rezim yang disemboyankan sebagai sebuah birokrasi total tetapi dalam perjalanannya tak lebih dari Orde Lama. Ini dilihat

dari garis besar kebijakan politik Orde Baru yang sepenuhnya dipegang oleh angkatan bersenjata (ABRI) yang terkesan anti partainya.

Cara yang dilakukan Soeharto dengan menyiapkan strategi memaksakan ketentuan perpolitikan baru dan mengundur pelaksanaan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1968 akan tetapi diundur menjadi tanggal 5 Juli 1971. Dalam rentang masa penundaan pemilu, rezim Orde Barupun dirancang oleh ABRI terutama oleh TNI AD berusaha menciptakan tahap-tahap pengamanan melalui jalur-jalur konstitusional dengan menetapkan posisi fungsi politiknya di legislatif melalui lembaga dwi fungsi ABRI.

Kemudian kekuatan pendukung pemerintah yaitu Golkar sibuk menggarap undang-undang pemilihan umum, sehingga lahir undang-undang no 16 tentang susunan dan kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah³⁸

Partai-partai politik yang ikut pada pemilu tahun 1971 yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Parti NU, Partai Katolik, Murba, PSII, Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Perti, Pakindo, Golkar yang menjadi kekuatan Orde Baru, dan Parmusi yang merupakan kanalisasi aspirasi umat Islam yang belum tertampung oleh partai-partai yang ada dengan kemenangan Golkar sebagai hasil akhir pemilu tahun 1971.

Menyadari posisi partai-partai yang terjepit tidak ada pilihan lain bagi partai politik untuk segera merencanakan fusi partai-partai. Apalagi dengan adanya undang-undang penyederhanaan partai pada tahun 1973 untuk menggabungkan

³⁸DPP Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat*, hal. 51

diri, terutama partai Islam yang sejak diparlemen sudah membentuk kelompok persatuan pembangunan. Ada 3 pendapat dari kalangan ABRI terhadap fusi partai Islam yaitu;

1. Jangan disatukan dalam satu partai, karena dikhawatirkan di kemudian hari akan menjadi balik menuntut dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI.
2. Perlunya partai-partai Islam disatukan dalam satu wadah agar mudah dikontrol dan dikuasai
3. Agar partai Islam diberi tempat yang wajar dan dibiarkan berkembang secara alami, tetapi diberi pengarahan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan.

Kemudian dalam kalangan Islam sendiri terdapat 3 pendapat mengenai fusi yang mereka lakukan yaitu;

1. *Kalangan NU secara formil menolak melalui kongres yang dilakukan di Surabaya tahun 1972. Hasil kongres tersebut menolak fusi partai Islam menjadi satu partai, karena dikhawatirkan nanti NU bisa menjadi minoritas.*
2. *Kalangan PSII di bawah pimpinan M. Ch. Ibrahim dan Bustaman, SH menolak fusi partai Islam, cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan intruksi nomor 193 tanggal 18 Oktober 1972.*
3. *Kalangan Parmusi dan Perti sejak semula memang menginginkan fusi ke dalam satu Partai Islam karena sesuai dengan cita-cita dan semangat ukhuwah Islamiyah yang selalu menganjurkan untuk bersatu dan bermusyawarah*³⁹

³⁹Umar Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (Jakarta: Integrita Press, 1984), hal. 79-82

Pada akhirnya fusi dilakukan dengan memberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), usulan nama tersebut diberikan dari Lukman Harun, Adapun keuntungan yang diambil dari nama tersebut adalah; (1). *Nama ini sudah diperkenalkan dalam DPR sebagai nama kelompok.* (2). *Nama ini sekaligus memenuhi harapan dan himbauan pemerintah Orde Baru.*⁴⁰ Fusi partai Islam dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973.⁴¹

Piagam pendirian PPP ditandatangani oleh lima orang yang mewakili empat partai Islam dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, yaitu; KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama; H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.⁴²

Dalam Perjalannya PPP telah melaksanakan 4 kali muktamar, dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari ka'bah (Pemilu 1977-1982) menjadi gambar bintang(1987-1997), karena mengacu pada UU No.3/1982 yang menyaratkan bagi peserta pemilu harus berasaskan Pancasila. Pada muktamar ke IV di Jakarta, 29 November-2 Desember 1998, mengamanatkan PPP untuk kembali pada asas Islam dan lambangnyapun berubah kembali menjadi ka'bah.

⁴⁰Umar, *Strategi PPP*, hal.78-79

⁴¹Tiga dasar pertimbangan deklarasi fusi pada tanggal 15 Januari 1973; (1). Sebagai bukti partai Islam memberikan respon positif terhadap keputusan pemerintah. (2). Semangat persatuan di kalangan Islam sebagai bukti akibat kealahannya dalam pemilu 1971. (3). Isu penyederhanaan partai semakin berkembang, dimulai melalui fusi di DPR, yang pada akhirnya pemerintah mengajukan RUU kepartaian kepada DPR

⁴²DPP Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat*, hal. 160

Menurut Undang-Undang yang ditetapkan pada tahun 1973 partai ini mempunyai dua tujuan yaitu;

1. Mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945 dan Islam
2. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah “Spiritual” dan “material” berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Visi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya masyarakat yang madani yang adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT. *Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur* dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Masyarakat madani yang dicita-citakan itu dapat dijelaskan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang antara lain tercermin dalam;

1. *Kehidupan yang beragama yang rukun, saling menghormati, bergairah, bermakna, dan inisiatif*
2. *Kehidupan masyarakat yang tertib, yang ditandai dengan tegaknya hukum dan keadilan.*
3. *Kehidupan sosial budaya yang prulalis*
4. *Kehidupan berpolitik yang demokratis, aspiratif, dan partisipatif dalam mewujudkan good govermance yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
5. *Kehidupan sosial-ekonomi yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin*
6. *Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, aman dan damai dalam pergaulan dunia baru yang berkeadilan.*⁴³

⁴³DPP Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat*, hal. 33-34

Misi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar melalui khidmat partai sebagai berikut:

1. *Berjuang untuk mewujudkan dan membina manusia seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan mengembangkan Ukhuwah Islamiyah Nahi munkar yang dilakukan dengan mencegah berkembangnya paham-paham Ateisme, Komunisme, Marxisme, Leninisme, Sekularisme, dan pendangkalan Agama.*
2. *Memperjuangkan hak asasi dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang harkat dan martabat manusia dengan mengembangkan Ukhuwah Islamiyah, Nahi munkar dengan mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia, dehumanisasi, diskriminasi dan budaya kekerasan.*
3. *Berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan Ukhuwah Islamiyah Nahi munkar dengan menentang dan mencegah proses desintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika.*
4. *Memperjuangkan Demokrasi sebagai cermin kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Nahi munkar dengan mencegah dan menentang otoriterisme, Fasisme, kediktatoran, hegemoni dan kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.*
5. *Memperjuangkan Baldah at thayyibah. Nahi munkar dengan mencegah berkembangnya berbagai bentuk kesenjangan sosial ekonomi dan budaya, gaya hidup konsumeristis dan hedonistis, permisif, serta materealistis.⁴⁴*

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, maka PPP mengimplementasikannya pada kebijakan dan strategi perjuangan partai, sebagai berikut:

1. *Pencapaian visi dan misi partai mengarah pada pencapaian tujuan nasional alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dan hasil-hasil amandemen konstitusi.*
2. *Menempuh cara-cara konstitusional, demokratis, partisipatif, dijiwai oleh prinsip-prinsip partai.*
3. *Memantapkan pelaksanaan paradigma baru PPP.*
4. *Memantapkan konsolidasi organisasi menyeluruh dengan kepemimpinan yang solid, ditopang dengan sumberdaya dan dana yang memadai.*
5. *Menggalang aliansi, kerjasama dengan kekuatan-kekuatan lain yang memiliki kedekatan lain yang memiliki kedekatan visi dan misi perjuangan.⁴⁵*

⁴⁴Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat*, hal. 35

⁴⁵Partai Persatuan Pembangunan, *PPP 30 Tahun Bersama Umat*, hal. 35

Kemudian terdapat lima prinsip perjuangan PPP dalam melaksanakan aktivitas perjuangan politik. Prinsip tersebut meliputi:

1. *Prinsip Ibadah, bagi PPP segala bentuk kegiatan politik merupakan panggilan ibadah, bukan semata-mata kepentingan duniawi.*
2. *Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan kebenaran PPP menentang segala bentuk kebathilan, kemudian prinsip kejujuran sifatnya sangat fundamental dan esensial dalam perjuangan PPP, dengan kejujuran partai menolak segala bentuk kebohongan, manipulasi, yang merugikan dan mengkhianati amanat rakyat. Sedangkan dengan prinsip keadilan partai akan menentang segala bentuk ketidakadilan dan kezalliman sampai kesumber-sumbernya.*
3. *Prinsip Musyawarah. Dengan musyawarah bagi partai dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama, sehingga demokrasi dapat terwujud dengan baik dan nyata.*
4. *Prinsip Persamaan, Persatuan, dan Kebersamaan. Atas dasar prinsip kebersamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT sama, kemudian dengan persatuan akan terhindar dari bahaya desintegrasi, dan perpecahan bangsa. Dengan kebersamaan partai berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proposional.*
5. *Prinsip Istiqomah. Partai berprinsip untuk tetap konsisten terhadap perjuangan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.*

Dalam perjalannya PPP memiliki struktur yang sudah berganti sebanyak 5 kali. Adapun ketua umum setiap periodenya adalah;

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai mengundurkan diri tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan, SH.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy.

Era 1873-1982 menunjukkan adanya gairah dalam diri PPP untuk habis-habisan berjuang demi kejayaan Islam, Pada era ini Islam memainkan fungsi integrasi di antara berbagai partai Islam. Aktifitas PPP juga menunjukkan keberanian pemimpinnya untuk menghadapi setiap ancaman yang datang, ini terlihat dengan sikapnya menentang kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh partai Pemerintah.

PPP pada saat itu menghadapi dua ancaman sekaligus baik yang bersifat Internal maupun external. Adapun permasalahan yang di hadapi PPP yang bersifat

internal ialah;(1) Adanya Potensi konflik di antara dua unsurnya yang terbesar yaitu Nahdatul ulama dan Muslimin Indonesia, (2). Tidak adanya pemimpin yang bisa mengatasi setiap permasalahan yang timbul. (3). Sempitnya wawasan pemimpin, sehingga tidak munculnya gagasan dan program yang inovatif,

Selanjutnya permasalahan internal yang dihadapi PPP adalah: (4).Ketidakmampuan mencari alternative kegiatan di tengah kesempitan ruang gerak yang diciptakan oleh kebijakan, (5). Terputusnya komunikasi partai dengan masa umat di tingkat “*grassroot*”, (6). Keterbatasan Jumlah Kader yang memiliki Loyalitas terhadap Partai, (7). Tidak memiliki dana yang cukup untuk pengembangan partai di desa-desa, (8). Tidak memiliki wakil di dalam cabinet.

Adapun Konflik yang bersifat External adalah; (1). Pembatasan medan aktivitas partai di tingkat Kecamatan, (2). Keharusan Pegawai Negeri dan ABRI mendukung partai Pemerintah, (3.). Munculnya suasana memusuhi partai non pemerintah di kalangan masyarakat,(4) Adanya campur tangan Pemerintah atau pihak lain dalam pemilihan pemimpin Partai, dan (5). Terdapatnya konflik Idiologi.

Dari faktor-faktor di atas terdapat dua faktor yang dihadapi oleh PPP selama keberadaan mereka yaitu; perpecahan di antara unsur-unsur terutama NU dan MI dimana perpecahan dua kelompok ini memang sudah berakar dalam sejarah awal pergerakan politik

Dalam Konflik internal PPP terdapat lima corak konflik yaitu: konflik di antara unsur-unsur, konflik di dalam DPP PPP, konflik antara DPP PPP dengan fraksi PPP, Konflik dalam tubuh Fraksi PPP, dan terakhir adalah konflik DPP dengan pemimpin massa bawah. Selain itu aliansi Politik, dan terbatasnya posisi,

sumber-sumber, dan Perbedaan idiologi politik merupakan konflik yang terjadi dalam partai PPP pada masa Orde Baru.

Dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan Konflik yang dialami oleh PPP mulai dari tahun 1973-1988 menunjukkan adanya tiga kecenderungan yaitu; bersumber pada kepentingan pribadi dan masyarakat yang diwakili, sumber konflik tidak berasal dari perkara yang penting, dan yang terakhir tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan.



BAB III

Potret Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Sejarah

A. Perempuan dan Partai Politik dalam Islam

Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk berkiprah dalam dakwah dan arena publik lainnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing.

Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 71::

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

artinya

:"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah ayat 71)."

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa kewajiban *amar ma'ruf* (memerintahkan kebaikan) dan *nahy munkar* (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. *Taklif* (beban) perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai kewajiban syariat, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah bagi laki-laki atau perempuan. Ayat di atas menekankan satu bentuk tanggung jawab manusia untuk berdakwah.

Dalam Konteks Islam secara Bahasa (*lugoh*) politik (*al-siyasah*) berasal dari kata sasa-yasisu-siyasatan yang artinya mengurus kepentingan orang, dengan

pengertian ini Ahmad Athiyah mengatakan bahwa politik bermakna memelihara dan memperhatikan kepentingan rakyat, secara lebih jelas Syaikh Al-Bana mengatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat luar dan dalam negeri, interen maupun exteren, secara individu maupun masyarakat keseluruhan bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Ia juga berpendapat bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga mencakup upaya menciptakan system yang bersih dan berkeadilan dimana mekanisme control berperan besar.⁴⁶

Politik adalah tanggung jawab, pengaturan, dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan, maka dalam konteks Islam tidak terlihat adanya unsur perebutan kekuasaan dan sebagainya. Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah bukan pada keditaktoran para penguasa atau pada keinginan sekelompok orang. Islam mendatangi bahwasanya penguasa hanya merupakan pelaksana politik yang bersumber pada hukum-hukum Allah SWT, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik.⁴⁷

Dalam rentangan sejarah Islam, sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Mereka mengobati yang luka dan bahkan memanggul senjata di medan perang. Imam Bukhari meriwayatkan perkataan salah seorang *shahabiyat* (muslimah yang hidup di zaman Nabi): "Kami dulu berperang bersama Rosululloh SAW, memberi minum dan melayani tentara dan kami juga membawa pulang mereka yang terbunuh dan terluka ke Madinah". Para

⁴⁶Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Shahabiyat, Ra* (Bogor: CVIDeA Pustaka Utama, 2003), hal. 134

⁴⁷Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan Bercermin Pada Shahabiyat, Ra*, hal. 137

istri Nabi, seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Fathimah (Putri Nabi) juga tampil ke kancah publik.

Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Dari paparan itu sudah sangat jelas bahwa Islam tidak pernah dan tidak akan memasung perempuan untuk berkiprah di sektor publik, termasuk berpartisipasi di dunia politik, sepanjang tidak melanggar kodrat⁴⁸ dan norma-norma Islam yang sudah sangat jelas. Resistensi terhadap kiprah perempuan di dunia politik terjadi karena adanya kekhawatiran dengan terjunnya kaum perempuan ke sektor publik,

Seperti politik, bisa mengabaikan fungsi kodratnya, sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai istri bagi suaminya, sebuah peran yang sangat dihargai dalam pandangan Islam. sepanjang fitrah perempuan itu tidak terabaikan dan kaum perempuan bisa menjaga integritasnya sebagai seorang muslimah yang baik

Memang harus diakui, tidak ada penjelasan khusus yang lebih detail tentang bagaimana kodrat perempuan dalam Alquran dan Hadis. Namun kalau yang dimaksud kodrat perempuan adalah upaya untuk memberdayakan kaum perempuan, maka jelas terdapat argumen teologis di dalam Islam. Oleh karena itu, kehadiran Islam haruslah disyukuri oleh kebanyakan kaum perempuan di dunia, khususnya di negeri yang populasi penduduknya mayoritas muslim ini.

⁴⁸Yang dimaksud dengan kodrat adalah sesuatu pemberian/ ketentuan Tuhan yang diberikan kepada manusia baik laki-laki, maupun perempuan dan tidak bisa dirubah ataupun dipertukarkan.

Betapa tidak, sebelum kedatangan Islam kaum perempuan selalu ditempatkan sebagai objek yang hampir tidak mempunyai hak-hak pribadi. Seorang perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan misalnya, dan tidak pula mempunyai hak-hak politik seperti halnya kaum laki-laki. Mereka harus tunduk di bawah tekanan dan keinginan suami yang berkewajiban untuk mengamankan dan membereskan segenap isi rumah dan seterusnya. Meski demikian, kehadiran Islam kemudian mengangkat harkat kaum perempuan dalam posisi yang setara dengan kaum laki-laki.

Alquran memberikan pandangan optimistis terhadap perempuan, salah satunya dengan menekankan prinsip bahwa ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Alquran berusaha memandang perempuan dalam suatu struktur kesetaraan gender dengan kaum laki-laki.

Catatan sejarah tentang posisi perempuan dalam struktur sosial, khususnya pada masyarakat Arab pra-Islam, sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari objek perlakuan seks kaum laki-laki dan sebagai beban dalam strata sosial. Bukan hanya mereka dipandang tidak mampu mengangkat kesejahteraan keluarga, bahkan sebaliknya menjadi beban ekonomi, tetapi juga karena budaya kabilah yang begitu kental dalam masyarakat Arab yang sering memicu timbulnya perang di antara mereka.

Kondisi ini kemudian menempatkan daya tawar kaum laki-laki lebih terhormat daripada kaum perempuan karena dianggap mampu mengangkat kehormatan kabilah dalam peperangan.

Itulah sebabnya, dalam budaya masyarakat Arab ketika itu, bukan sesuatu yang naif untuk menyingkirkan perempuan dalam kehidupan dan pergaulan. Tidak segan-segan mereka membunuh, bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang baru lahir ke dunia. Alquran sendiri menyinggung langsung hal ini dan menyindir mereka sebagai orang yang berpikiran picik karena menganggap kaum perempuan hanya sebagai beban sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini Allah berfirman, dalam surat al-An'am (6:151):

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مَوَاطِئَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

artinya

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang tampak di daratan maupun yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian yang diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu memahaminya (QS al-An'am/6:151)”

Dalam konstalasi inilah kemudian perlahan namun pasti, kehadiran Islam mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Perempuan yang

sebelumnya hanya ditempatkan dalam posisi sebagai objek yang hampir tidak memiliki hak dan peran sosialnya, kini telah kembali menjadi komunitas yang diperhitungkan keberadaan mereka

Dalam teks-teks agama akan ditemukan banyak sekali hadis yang memuliakan perempuan. Untuk itu, dengan sendirinya perempuan, di samping sebagai objek juga bisa lebih dipandang sebagai subjek dengan hak-hak dan kewajibannya yang disamakan oleh kaum laki-laki.

Ungkapan Alquran tentang perempuan memang hampir semuanya dalam bentuk dan kedudukan sebagai objek (*maf'ul bih*) dan umumnya menjadi pihak ketiga (*ghaibah*), sedangkan laki-laki lebih banyak berkedudukan sebagai pelaku (*fa'il*) dan pihak kedua (*mukhathab*). Namun, tidak berarti Alquran menoleransi adanya struktur sosial berdasarkan jenis kelamin. Hanya dalam struktur bahasa Arab, yang digunakan dalam menyimbolkan makna Alquran, dimensi gender memang dominan.

Pada hakikatnya dalam Islam derajat antara laki-laki maupun perempuan itu sama yang membedakan adalah ketakwaan mereka. Kemudian perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin tetapi bukan secara resmi menjadi “kepala” dalam suatu organisasi, lembaga, ataupun rumah tangga melainkan ia dapat menjadi “pemimpin” bagi organisasi, maupun lembaga tersebut melalui pengaruhnya. dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya”

“Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, Lelaki (suami) adalah

pemimpin di rumah tangganya, Perempuan (Istri) adalah pemimpin di rumah suaminya terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (HR. Buhari dan Muslim melalui Abdullah Ibnu Umar RA)

Dari Hadist dan Al-quran yang penulis paparkan di atas jelaslah bahwa Dengan ketentuan ini sesungguhnya Islam telah memuliakan perempuan, belum lagi peranan mereka sebagai ibu yang sangat penting dan mulia dalam Islam. Selain itu, bahwasannya pada generasi awal Rasulullah dalam momen tertentu terjadi dimana laki-laki dan perempuan beramal bersama-sama di medan amal yang sama. Mulai dari ibadah, menuntut ilmu, hingga peperangan.

Dalam masa Rasulullah dahulu kegiatan berpolitik tidaklah seperti sekarang ini, seperti adanya pemilu, parlemen, dan sebagainya. Namun bila pemilu adalah suatu sarana untuk memberi pendapat atau kesaksian tentang kepantasan seseorang untuk menjadi pemimpin, maka sesungguhnya hal ini juga telah dilakukan oleh para *shahabiyah*. Sebagai contoh adalah bai'at aqobah pertama dan kedua dimana beberapa *shahabiyah* ikut serta pula di dalamnya

Dilihat dari pertimbangan di atas jelaslah bahwa perempuan dapat saja berperan dalam bidang politik, baik dalam jabatan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Terutama bila ditemukan memang tidak ada laki-laki yang dapat menggantikannya. Kecuali pada kedudukan *imamah uzhma* seperti khalifah, atau presiden, dan sejenisnya. Namun demikian ada beberapa hal yang harus dijaga oleh setiap perempuan ketika memasuki ranah politik yang rentan akan terjadinya fitnah,

Terkait dengan betapa mulianya dan pentingnya kedudukan mereka bagi orang-orang tertentu seperti anak dan suaminya, begitu pula untuk menjaga

kebaikan bagi diri mereka sendiri. Seperti menjaga Fitrah dan tugas asasinya sebagai Ibu yang baik dan Istri yang baik.

http://3ramadhan1405.multiply.com/journal/item/25/peranan_kaum_perempuan_dalam_politik_menurut_islam_-_ftn2

B. Perempuan dan Partai Politik dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia.

Perkembangan politik dalam masa Orde Baru berlangsung dengan sentralisasi kekuasaan pada elit kekuasaan, atau lebih jelasnya pada kantor kepresidenan dan kelompok intinya. Pola kekuasaan Orde Baru sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebudayaan Jawa. Sebagai alat politik pembangunan otoritarisme militer, dengan mengatasnamakan Stabilitas Nasional telah membatasi partisipasi politik pada saat itu.⁴⁹

Dalam menjalankan semua program pemerintah saat itu seluruh arus pembangunan diarahkan semata-mata pada dua tujuan utama, yaitu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kepentingan pembangunan hanya berorientasi pada aspek material dan sama sekali tidak menyentuh aspek kemanusiaan, seperti perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam bidang politik, rekayasa yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru ialah dengan mengambil bentuk pembatasan jumlah partai politik, mempertahankan konsep massa mengambang, mengontrol setiap agen politik termasuk Intelektual, kaum muda, mahasiswa, dan media massa. Ini

⁴⁹Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 38-39

dikonsepsikan oleh pemerintah sebagai suatu keniscayaan, karena stabilitas politik akan menjamin pelaksanaan ideologi yang ditetapkan pemerintah.⁵⁰

Selanjutnya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan, dan bukan menyentuh pada kebutuhan strategis perempuan. Karena itu, tidak heran jika selama Orde Baru tidak terdengar adanya program yang berupaya mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang demokratis,

Pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat.⁵¹

Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/ pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di

⁵⁰Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, hal. 39

⁵¹Khofifah Indar Parawansa, dkk, *Perempuan Di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah: Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia* (Jakarta: AMEPRO, 2002), hal.43

daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu.

Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan bangsa. Mereka selayaknya dilibatkan dalam urusan kebijakan politik sebagai wujud kesetaraan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dalam undang-undang pemilu no 12 tahun 2003 telah membuka peluang dan mengamanahkan kepada partai politik peserta pemilu untuk sedikitnya mencalonkan 30% untuk calon legislatif bagi perempuan.

Selanjutnya Partai politik dalam Undang-undang Partai politik Republik Indonesia no 31 tahun 2002 dijelaskan bahwa Partai politik adalah Organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.⁵²

Peran perempuan dalam dunia politik tidaklah bisa dipandang sebelah mata seperti pepatah : *"Wanita adalah tiang negara, bila wanitanya baik maka baiklah negaranya dan apabila buruk maka buruk pula negaranya"*⁵³, namun keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja politik perlu mempertimbangkan beberapa hal yang tidak selalu dapat diberlakukan secara umum dan tetap perlu memperhatikan kondisi personal. Untuk itu pemahaman tentang pentingnya

⁵²Partai Politik dan Pemilihan Umum (Jakarta: CV Eko Jaya, 2003), hal. 5

⁵³Korps HMI-wati PB HMI Periode 1992-1994: Korps HMI Wati dalam Sejarah 1966-1994 (Jakarta: Rakasta Samasta, 1995), hal. 18

partisipasi politik secara merata perlu terus disosialisasikan agar kontribusi yang diberikan wanita dalam perbaikan bangsa akan semakin optimal.

Dalam aplikasinya kepentingan perempuan dalam partai politik, ada tiga posisi kepentingan yaitu: **pertama** adanya kepentingan pribadi :Sebagai politisi memiliki kepentingan merebut posisi-posisi strategis di internal partai seperti: pengurus, Calon legislatif, anggota parlemen, ataupun kepala daerah., **kedua** kepentingan partai politik: Sebagai bagian dari partai, memiliki tanggung jawab memenangkan partainya dalam pemilu karena perolehan suara partai yang banyak akan berpengaruh pada pemenuhan kepentingan pribadi sebagai politisi.

Dan yang terakhir (**ketiga**) Kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui jalur politik. Untuk itu kiprah perempuan dalam partai politik bukan sekedar menjadi 'milik privat' tetapi menjadi representasi dari paradigma pentingnya perempuan ada dalam (proses) politik.

Aspek lain yang secara signifikan menentukan peningkatan keterwakilan perempuan adalah peran organisasi dan aktivis pembela hak perempuan dalam partai politik, terutama di tingkatan akar rumput. Organisasi dan aktivis menjalankan fungsi advokasi dan edukasi, sekaligus alat kontrol internal partai. Koordinasi dan konsolidasi semua aktivis atau organisasi perempuan dalam partai akan menguatkan kemampuan lobi dan posisi bergaining mereka dalam menekan konsistensi partai terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Dan dalam rutinitas yang ada Aktivis perempuan dan organisasi perempuan dalam parpol memainkan peran vital, terutama dalam menggalang kekuatan untuk menekan parpol dalam pencalonan kandidat serta aktivitas pendukung

lain, seperti pemenuhan potensi baru untuk dicalonkan, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan aktivis dari partai politik lain..

Dalam pemaparan hasil penelitian tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2008, Direktur Puskapol UI Dr. Sri Budi Eko Wardani menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki lembaganya, dari tujuh partai politik besar Partai Demokrat paling sedikit memiliki kader perempuan potensial. Mengutip data base yang dimilikinya Sri mengatakan, "Partai Demokrat hanya memiliki 25 kader potensial."

Dari data base itu terungkap bahwa partai yang paling banyak memiliki kader perempuan adalah Partai Golkar sebanyak 87 orang, PPP 67 orang, PAN 63 orang, PDIP 52 orang, PKB 40 orang, dan PKS 31 orang. Data itu diambil dari tujuh partai politik besar di empat provinsi, yaitu: Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Berbicara perpolitikan di Indonesia berarti berbicara tentang kebijakan dimana berbicara kebijakan adalah wilayah kekuasaan, wajar ketika perempuan tidak bisa menentukan sebuah kebijakan karena secara faktual perempuan tidak mempunyai kekuasaan baik formal maupun informal. Fakta dilapangan menyatakan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat Legislatif maupun eksekutif yang posisinya pada level pengambil keputusan (*decition maker*) sangatlah kecil.

Sejak adanya kuota 30% kiprah perempuan dalam partai tidak ada yang mencapai angka kuota tersebut, ironisnya jumlah perempuan yang terpilih untuk

duduk di parlemen hanya berkisar 8- 10%. Pendaftaran pencalonan dari masing-masing kekuatan sosial politik bisa mencerminkan lebih dari 10 % calon perempuan, akan tetapi kenyataannya yang terpilih tidak lebih dari itu.

Di peroleh dari berbagai sumber pada tabel berikut, secara kronologis dalam komposisi jumlah perempuan di DPR dari tahun 1950- 2004 adalah sebagai berikut⁵⁴

Tabel 7
Perempuan Di DPR tahun 1950-2004

Masa Bakti DPR	Perempuan	Jumlah Anggota	Persentasi
1950-1955 (DPRS)	9	236	3,8
Konstituante 1956-1959	25	488	5,1
1955-1960	17	272	6,3
1971-1977	36	460	7,8
1977-1982	29	460	6,3
1982-1987	39	460	8,5
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12,5
1997-1999	54	500	10,8
1999-2004	45	500	9

Data dan fakta berdasarkan sumber yang diolah oleh Miriam Budiarjo

Berdasarkan Blachkum untuk masa kerja DPR dari tahun 1950 hingga masa konstituente. Masa kerja DPR 1972 hingga 1997 berdasarkan rekapitulasi Bintan R. Saragih di Suara Pembaharuan, 22 April 1994. Masa kerja DPR tahun 1997 hingga

⁵⁴Jurnal Perempuan edisi 34, *Politik dan Keterwakilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Maret, 2004), hal. 21

1999 berdasarkan data dari Sekretariat Jendral DPR/MPR RI masa kerja 1999 sampai 2004 berdasarkan data dari buku lampiran VII, komisi pemilihan umum 1999.

Pada Pemilu 1999 ini saja tingkat keterwakilan perempuan secara kuantitatif di DPR-RI hanya mencapai 9, % lebih kecil dibanding pemilu 1997 yang mencapai kira-kira 11%. Keterwakilan ini baru pada tataran kuantitas, belum bicara kualitas, artinya secara kuantitas saja perempuan tidak terwakili bagaimana dengan kualitas? Padahal hampir 51 % jumlah massa pemilih pada setiap pemilu adalah perempuan dan sangat ironis pula jumlah yang besar ini hanya terwakili sebanyak 9, %.

Yang artinya angka pemilih perempuan dalam pemilu 1999 diperkirakan sejumlah 57% dari keseluruhan total pemilih akan tetapi dari banyaknya pemilih perempuan dalam pemilu 1999 tidak ditemukan data yang lengkap dan menyeluruh yang dapat memberi Informasi mengenai jumlah dan latar belakang perempuan menjadi pemilih dalam pemilu tahun 1999.

Dapat dilihat secara umum pada lima partai besar yaitu PKB, GOLKAR, PDI, PPP, dan PAN telah bersepakat untuk menerima kuota 20-30%. Perolehan suara lima partai dalam pemilu 1999 dengan perolehan kursi di DPR dikaitkan dengan jumlah wakil perempuan di DPR yaitu;⁵⁵

Tabel 8

Perolehan kursi Lima Partai Besar dalam Pemilu 1999

⁵⁵Jurnal Perempuan, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah* (Jakarta: AMEPRO, 2002), hal. 21

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi di DPR	Jumlah Wakil Perempuan di DPR
PDIP	33,7%	153%	15
Golkar	22,4%	120%	16
PKB	12,6%	51%	3
PPP	10,7%	58%	3
PAN	7,1%	34%	1

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai maupun anggota parlemen serta institusi formal politik lainnya di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan baik bagi keterwakilan perempuan dalam politik formal Indonesia hal ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 9

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik Formal⁵⁶

Lembaga	Perempuan		Laki-laki		Jumlah 100%
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
MPR*	18	9,2	177	90,8	195
DPR*	45	9	455	91	500
MA*	7	14,8	40	85,2	47
BPK*	0	0	7	100	7
DPA*	2	4,4	43	95,6	42
KPU*	2	18,1	9	81,9	11
Gubernur*	0	0	30	100	30
Bupati*	5	1,5	331	98,5	336
Eselon**	1.883	7	25.110	93	16.993
Hakim**	536	16,2	2.775	83,8	3.311
PTUN**	35	23,4	150	76,6	185

⁵⁶Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO, 2001 dan untuk tanda (**) dalam tabel di atas penulis peroleh dari hasil pidato menteri negara Pemberdayaan Perempuan RI pada semiloka "Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilu", 21 Juni 2001

Data di atas menunjukkan tingkat representasi perempuan Indonesia pada saat ini hanya 9% dari total jumlah wakil rakyat di DPR-RI, tingkat keterwakilan ini adalah yang terendah sejak pemilu tahun 1987, dimana penurunan keterwakilan perempuan dalam area politik formal, dan kenijakan nasional terjadi secara bertahap dalam tiga pemilu terakhir.

Tabel di atas memperlihatkan tahapan penurunan tersebut dari 13% pada pemilu 1987, menjadi 12,5% pada pemilu 1992, turun menjadi 10,8% pada pemilu tahun 1997 dan mencapai 9% pada pemilu 1999⁵⁷. Atau bisa penulis gambarkan dalam tabel di bawah ini tentang keterwakilan perempuan di DPR-RI sesuai masa kerja DPR mulai dari tahun 1982 sampai 2004;

Tabel 10

Tingkat Representasi perempuan di Lembaga DPR-RI

Masa Kerja DPR-RI	Perempuan	Laki-Laki
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)

Berikut ini adalah tabel yang akan menggambarkan penyebaran anggota perempuan dalam komisi-komisi d DPR-RI berdasarkan Fraksi.

Tabel 11

⁵⁷Sekretariat DPR-RI, 2002, diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO, 2001

Penyebaran Anggota Perempuan Dalam Komisi-Komisi D Dpr-Ri

Berdasarkan Fraksi Hasil Pemilu 1999⁵⁸.

Fraksi	Komisi										Jumlah	
	I	II	III	IV	V	IV	IV	VII	IX	Perempuan	Laki-Laki	
PDIP	0	2	0	0	3	3	3	2	3	16	131	
PG	2	1	2	1	2	2	4	1	0	15	100	
PPP	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	55	
PKB	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	44	
Reformasi	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	38	
PBB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	
PDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
KKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
PDKB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
TNI/POLRI	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	35	
Jumlah Perempuan	4	3	3	4	6	6	11	4	3	44	439	
Jumlah Laki-Laki	53	58	49	51	50	42	33	51	52			

Menurut informasi penempatan anggota perempuan dalam komisi-komisi di DPR umumnya ditentukan oleh pimpinan Fraksi masing-masing kebanyakan anggota parlemen ini tidak memilih sendiri komisi yang dianggap sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil bahwasanya perempuan dan partai politik kerap berada pada kondisi kontradiksi yang cukup rumit yaitu antara kepentingan partai politik versus kepentingan perempuan itu sendiri. Dari banyak kepentingan yang ada, pada Kondisi Obyektif Partai Politik dan masalah perempuan adalah sebagai contoh;

⁵⁸Sekretariat DPR-RI, 2002, diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO

1. Rendahnya jumlah perempuan dalam kepengurusan partai di berbagai tingkatan. Hal ini menyebabkan rendahnya posisi bergaining oleh perempuan dalam proses pengambilan keputusan internal partai.
2. Belum adanya tindakan afirmatif internal partai politik untuk perempuan. Dari 7 partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2004, hanya tiga yang mulai mengatur tindakan afirmatif ini dalam AD/ART-nya, yaitu PBB, GOLKAR, PPP. Keterlibatan kaum perempuan dalam struktur kepengurusan DPP tahun 2005-2010 masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah pengurus yang ada.
3. Beberapa contoh aturan internal partai tentang perempuan, dimana belum banyak partai yang mengakomodasi kepentingan kaum perempuan dalam AD/ART nya.
4. Ketrampilan politik politisi perempuan yang masih rendah sehingga kurang sensitif terhadap perkembangan situasi politik, termasuk dinamika di internal partai, kurang mampu melakukan lobi dan cenderung tidak asertif dalam membela kepentingannya.
5. Kerap terjadi soliditas sesama perempuan di internal partai yang rendah, menyebabkan kelompok perempuan mudah dikendalikan dan tidak saling menjaga. Hal ini terlihat misalnya dalam masa pencalonan bakal calon legislatif.
6. Kurang memberikan kontribusi yang tepat dan efektif dalam bidang pemberdayaan perempuan di partai disebabkan berbagai hal. Misalnya tidak memahami tugas, tidak memahami kepentingan perempuan seperti

apa yang harus diperjuangkan, tidak mampu melakukan negosiasi dengan pengurus lain yang laki-laki, bahkan ada kasus tidak didukung oleh sesama perempuan di partainya.

7. Persaingan antara bidang perempuan dalam struktur kepengurusan partai dengan sayap perempuan partai, terutama dalam hal akses ke pimpinan tertinggi partai.
8. Basis sosial politik yang belum kuat dan tidak terbangun dengan baik. Hal ini terkait dengan latar belakang rekrutmen perempuan terlibat dalam partai. Situasi ini berpengaruh pada kemampuan mengelola jaringan dan konstituen yang dibutuhkan pada saat pencalegan dan pemilu.

Dari 8 point diatas yang telah penulis paparkan terlihat bahwasanya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih adanya diskriminasi atas perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Dengan adanya responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan, dan semangat serta kesadaran yang tumbuh dalam diri kaum perempuan untuk berpartisipasi di politik diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat hanya demi menarik dukungan kaum perempuan.⁵⁹

Bahkan menurut data dan catatan Sekjen MPR RI ada empat hal yang menjadi catatan penting mengenai minimnya partisipasi politik perempuan di Indonesia ini, yakni:

⁵⁹<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=605>

1. Perempuan yang menjadi anggota MPR terus berkurang dalam tiga Pemilu terakhir, Pemilu 1992 (6,0%), Pemilu 1997 (11,8%) dan Pemilu tahun 1999 menurun menjadi (9,1%).
2. Perempuan yang menjadi anggota DPR persentasenya terus menurun dari 12,0% pada Pemilu 1992 menjadi 11,2% pada Pemilu 1997 dan 8,8% pada Pemilu 1999.
3. Perempuan yang menjadi anggota DPR dipandang dari sisi usia, umurnya relatif lebih muda daripada laki-laki. Persentase anggota DPR perempuan yang berusia dibawah 40 tahun sebesar 22,7% sedangkan laki-laki hanya 9,4%.
4. Pendidikan perempuan anggota DPR relatif lebih rendah daripada laki-laki. Anggota perempuan yang berpendidikan Akademi/PT 84,1% sedangkan laki-laki 91,7%.

C. Perempuan dan Sejarah Perkembangan Undang-Undang Partai Politik Di Indonesia

Proses Demokrasi pasca Orde Baru (1998) dan amandemen UUD 1945 menjadi suatu perubahan yang signifikan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Sejumlah Undang-undang dan kebijakan semuanya itu membuka ruang publik yang cukup besar untuk perempuan secara langsung dan berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dimaksud diatas adalah demokrasi yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik perempuan.

Diantara kebijakan yang sangat mendukung partisipasi perempuan diruang politik pada ketentuan yang mengharuskan agar partai politik agar memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender terutama dalam menyusun kepengurusan yang terdapat pada pasal 13 Undang-Undang No.31 tahun 2002 tentang partai politik adalah tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota minimum 30% perempuan calon legislatif pada daftar partai politik peserta pemilihan umum pasal 65 (1) Undang-undang No 12 Tahun 2003.⁶⁰

Hari Selasa tanggal 18 Februari 2003 merupakan hari bersejarah bagi pergerakan perempuan di Indonesia, Setelah bertahun-tahun berjuang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik, akhirnya membuahkan hasil dengan dicantumkannya persoalan kuota 30% dalam Undang-Undang Pemilu pasal 65 ayat 1⁶¹ yang berbunyi ;

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Banyak tokoh perempuan yang paling berperan sebagai pemotivatoris gerakan perempuan di Indonesia dalam menentukan Undang-Undang keterwakilan perempuan di parlemen diantaranya adalah Khafifah Indar Parawansa, Nursyahbani Katjasungkana, Ida Fauziah, Nurdiati Akma, dan Titi Sumbang. Menurut mereka partai politik merupakan salah satu jalan yang sangat penting untuk **mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan** di parlemen..

Disahkannya UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, memang memiliki dampak politik besar terhadap upaya marginalisasi perempuan dibidang politik (pasal 65

⁶⁰Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia* (Jakarta: Kibar Press, 2008), hal. 92-93

⁶¹Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2002), Hal .169

ayat (1)). Parpol sekarang tidak bisa berdalih bahwa meminggirkan perempuan dalam dunia politik itu diperbolehkan. Ini merupakan satu revolusi yang harus dilakukan Partai Politik, yang tidak hanya sekedar bicara masalah 30% tetapi sudah bicara masalah masa depan yang menyangkut persoalan Bangsa dan Negara.

Dalam beberapa partai politik Islam dan partai politik yang berbasis masa Islam, peningkatan keterwakilan perempuan tidak signifikan terlihat pebandingan antara partai islam dan partai yang berbasis masa Islam seperti Partai persatuan pembangunan (PPP) perempuan yang masuk di Parlemen 5,26%, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) perempuan yang masuk di parlemen 13,20%, Partai Amanat nasional (PAN) perempuan yang masuk di parlemen 13,20%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS perempuan yang masuk di parlemen 10,41%, Partai Bintang Reformasi (PBR) persentase perempuan yang masuk di parlemen 15,38%, Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memiliki perempuan yang duduk di parlemen

Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih kurang dari kuota 30% yang disebabkan karena masih minimnya perempuan yang menempati posisi strategis di Partai politik. Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Gender serta meningkatkan kemitrasejajaran di dalam partai politik dan parlemen, penting untuk perempuan menempati posisi strategis dalam partai politik,

Namun demikian keterwakilan perempuan di parlemen bertujuan untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-hak politik perempuan Indonesia. Serta dalam kehidupan berpolitik harus terciptanya kesinambungan peran politik laki-

laki dan perempuan dalam parlemen atau dalam pemerintahan mendapat posisi yang equal, maka kepentingan perempuan tidak akan dipinggirkan demikian pula dengan laki-laki.

Tetapi ternyata perempuan juga memiliki hambatan dari sisi urusan domestik, banyak perempuan yang terjebak dalam rantai kemiskinan, kemudian hambatan ideologi, interpelasi (*Keterangan atau Penjelasan*) agama, custom adat istiadat dan budaya. Hambatan lain yang sangat terasa adalah media, media sendiri sampai sekarang belum memperhatikan potensi kaum perempuan, karena selama ini yang ditulis selalu kemampuan laki-laki dan jurnalis perempuan memang sangat minim⁶².

Seluruh komponen bangsa memang harus terlibat didalamnya. Termasuk adalah kalangan Partai Politik, dalam membuat kebijakan atau *police* partai haruslah berperspektif perempuan. Hal ini sejalan dengan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan politik sekarang.

Dalam bidang politik salah satu cara yang dianggap sebagai langkah yang paling strategis adalah dengan menempatkan perempuan-perempuan dalam posisi strategis di kawasan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dengan demikian perempuan akan terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan, termasuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kepentingan kaum perempuan.

⁶²Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*, hal. 95-105

Walaupun keberadaan UU No 12 Tahun 2003 telah menjamin keterlibatan partisipasi aktif kaum perempuan di pentas politik nasional, ternyata konstruksi sosial di Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya. Sebab, pada hakekatnya sistem sosial bangsa Indonesia cenderung patriarkhi. Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan aktivis Feminisme yang menganggap UU No.12 Tahun 2003 sebagai kebijakan ?setengah hati.? Sekalipun sudah mendapat payung hukum untuk terlibat langsung di pentas perpolitikan nasional..

Aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik di tegaskan kembali dalam Pasal 65 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, perempuan yang berhasil masuk dalam pentas politik tahun 2004 masih kurang dari 30%, walaupun dalam pencalonannya melebihi dari kuota 30%.

Jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya bagian yang sedikit dari jumlah keseluruhan,

Misalnya Golkar hanya 19 orang, PDI-P hanya 12 orang, Demokrat hanya 8 orang, PAN 7 orang, PKB 7 orang, PKS 5 orang, PPP 3 orang, PBR 2 orang, dan PDS 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan belum ditempatkan pada posisi-posisi yang berpeluang terpilih, yaitu berdasarkan nomor urut dan daerah pemilihan.

Dalam draft RUU Pemilu telah memuat mengenai keterwakilan perempuan. Dalam rumusannya disebutkan, pencalonan terhadap bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik dengan mekanisme internal partai politik secara demokratis dan terbuka.

Penguatan terhadap rumusan tersebut diatas, maka ditambahkan rumusan yang memuat, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik paling sedikit harus memuat 30% bakal calon perempuan, apabila Partai Politik tidak mencalonkan minimal 30% bakal calon perempuan maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengembalikan Daftar Bakal Calon yang diajukan oleh partai politik apabila partai politik peserta pemilu tidak memuat 30% perempuan di dalam daftar bakal calon yang diajukan dan mengumumkan di media massa partai politik yang memuat dan tidak memuat bakal calon minimal 30%.

Memang tidak jauh berbeda dari rumusan aturan sebelumnya yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 juga harus memuat bakal calon perempuan sekurang-kurangnya 30%, akan tetapi rumusan dalam RUU Pemilu ini masih ada unsur pemaksanya dengan pengembalian daftar bakal calon oleh KPU. Artinya menjadi suatu keharusan bagi partai politik mencalonkan perempuan sebesar minimal 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam RUU Pemilu memang masih ada kelemahannya, yaitu mengenai aturan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang tidak menjalankan ketentuan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan. Namun, ini menjadi PR yang panjang dalam perjuangan kaum perempuan untuk mewakili kepentingannya sehingga aturan keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar formalitas belaka.⁶³

⁶³<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=21010>

Dari uraian panjang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah kandidat perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif adalah sebagai berikut.

Pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun di politik.

Kedua, bagaimana menyakinkan parpol bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting sehingga perlu peningkatan rekrutmen calon perempuan dan selanjutnya menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) parpol dan

Ketiga bagaimana menyakinkan masyarakat, termasuk media massa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya di lembaga legislatif daerah. Perjuangan untuk memenuhi kuota ini memang bukan perkara mudah, terutama jika menyadari bahwa budaya patriarki sudah sedemikian merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itulah kendala utama yang menghadang gerak kaum perempuan dalam seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali bidang politik.

BAB IV

Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan

A. Kebijakan Partai Tentang Kepemimpinan Perempuan.

Terkait perbincangan tentang kepemimpinan perempuan, dalam konteks perkembangan wacana Islam, isu ini melahirkan dua aliran besar. Pertama; aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik, terlebih lagi dalam ranah publik, Kedua aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan pada laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan termasuk menjadi kepala negara.⁶⁴

Tentang kepemimpinan perempuan khususnya dalam sebuah negara memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, perdebatan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin menurut hukum Islam masih berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 1975 Organisasi Wanita Islam⁶⁵ mengadakan seminar mengenai “Islam dan Wanita “ dimana dalam seminar tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga baik politik ataupun negara.

Aisah Aminiy salah seorang pelopor perempuan dalam lembaga Partai Politik menhatakan

⁶⁴Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 59-60

⁶⁵Organisasi Wanita Islam yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 1962 dan dipimpin oleh tokoh-tokoh wanita seperti Ibu Zaenab Damiri, Ibu Abu Hanifah, Ibu Aisyah Hilal, Ibu RABS Samsurizal, Ibu Pujo Tomo, dan Ibu Gito Atmojo. (Ramli H.M dan Yusuf S.H, *Aisyah Aminiy Demokrasi Tanpa Henti* (Jakarta: Lembaga Study Pembangunan Indonesia (LASPI), 2002), Hal. 33)

*“ Islam tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin Pada masa Nab Muhammad kedudukan perempuan sangat dihormati dan mempunyai peranan penting itupun berlaku setelah nabi wafat . Istri Nabi Siti Aisyah adalah perawi hadits di zamannya .dandia juga pernah memimpin pasukan pada “perang jamal”. Demikin pula dalam sejarah Indonesia di Aceh dulu ada sulthanah-sulthanah wanita, Sulthanah adalah wanita penguasa tertinggi dari suatu pemerintahan . Ini berarti bahwa Islam menempatkan seseorang dalam suatu kedudukan menurut kemampuannya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya”.*⁶⁶

PPP adalah sebuah organisasi yang menggunakan prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial, dimana setiap unsur dalam lembaga kepemimpinan bekerjasama demi kemajuan organisasi, sekalipun demikian unsur ketua umum tetap merupakan titik sentral dari seluruh gerakan organisasi. Kriteria utama bagi seorang pemimpin PPP bahwa selain merupakan anggota terbaik ia juga harus dapat diterima oleh semua pihak baik dalam tubuh partai maupun di luar partai.

Dalam pasal 6 ayat 1-b Anggaran Rumah Tangga ((ART) PPP hasil keputusan muktamar II dinyatakan bahwa untuk bisa menjadi anggota Dewan Pimpinan disemua tingkatan maka seseorang harus “ *Beriman dan bertakwa kepada Allah yang maha kuasa serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap partai persatuan pembangunan*”. Dan dalam ayat inilah yang menjadi acuan untuk menentukan seorang pemimpin dalam partai yang harus memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap partainya.

Sementara itu dalam pasal 6 ayat 1-1 Anggaran Rumah Tangga PPP hasil muktamar II disebutkan bahwa “ *untuk dapat dipilih menjadi anggota dewan partai pimpinan disemua tingkatan harus memenuhi syarat telah menjadi anggota sekurang-kurangnya lima (5) tahun* “ sedangkan untuk dapat dipilih menjadi

⁶⁶Ramli H.M dan Yusuf S.H, *Aisyah Aminy Demokrasi Tanpa Henti*, Hal. 52

anggota Dewan Pimpinan Pusat dalam pasal 7 ditegaskan (a) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat/Majlis Pertimbangan Pusat/Departemen, (b) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah atau, (c) pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang/Ketua Majlis Pertimbangan Cabang,

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah harus memenuhi syarat (a) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat/Majlis Pertimbangan Pusat/Departemen, (b) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah/Majlis Pertimbangan Wilayah/Biro, (c) pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang/Ketua Majlis Pertimbangan Cabang,

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pimpinan Cabang harus memenuhi syarat (a) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat/Majlis Pertimbangan Pusat/Departemen, (b) pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah/Majlis Pertimbangan Wilayah/Biro, (c) pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang/Ketua Majlis Pertimbangan Cabang/Bagian, atau (d) Pernah menjadi Komisaris/Pembantu Komisaris.⁶⁷

Pada dasarnya PPP tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah partai, karena sejak tahun 1984 PPP sudah membolehkan perempuan menjadi Ketua DPP PPP itu dibuktikan dengan Aisyah Aminy yang karena keaktifannya beliau terpilih menjadi ketua bidang Politik prtaktis dalam DPP PPP dan ia merupakan kader perempuan pertama yang mendapatkan kesempatan menjadi ketua dalam partai politik Islam.

⁶⁷Muhammad Rodja, *PPP Problematika dan Prospek*, hal. 84

Selanjutnya Aisyah menjadi ketua MPP PPP periode 1989-1994, kemudian beliau juga pernah menjadi ketua DPP PPP periode 1994-1999 dan menjadi wakil ketua Majelis Pakar PPP tahun 1999. Selain itu juga, PPP memberikan kuota sampai 7 orang perempuan di tingkat DPP sebagai pengambil keputusan di tingkat wilayah sebanyak 5 orang, di tingkat cabang sebanyak 4 orang dan tingkat ranting sebanyak 1 orang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua bidang pemberdayaan perempuan Partai Persatuan Pembangunan Nurhayati Payapo, berpendapat bahwa partai sangat mendukung tentang kepemimpinan perempuan dalam sebuah lembaga politik formal itu terlihat dari undang-undang partai Khusus yang menerangkan tentang peranan perempuan dalam kegiatan politik di dalam partai.

PPP sangat konsisten terhadap pemberdayaan perempuan, akan tetapi karena sumberdaya perempuan di dalam partai belum bisa menyamai atau bahkan dibawah laki-laki maka dari itu partai memberikan wadah khusus bagi perempuan agar dapat berkonsentrasi untuk membina kader-kader perempuan yang nantinya siap berkiprah berdampingan dengan kader laki-laki dalam politik khususnya dan bidang-bidang lain pada umumnya.

Dalam lembaga perempuan yang partai dirikan yaitu Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dimana lembaga khusus perempuan tersebut merupakan organisasi sayap kanan dari PPP. bahkan partaipun mendukung dengan kepemimpinan perempuan akan tetapi untuk menuju tahap menjadi pemimpin tersebut maka yang harus dilakukan oleh partai adalah memberikan ruang khusus

bagi kader perempuan dalam pelatihan untuk membentuk kader perempuan yang mampu memimpin.⁶⁸

Selanjutnya Wanita Persatuan Pembangunan dalam programnya sering melaksanakan pelatihan-pelatihan berjenjang di mana menurut Nurhayati Dalam sambutannya mengatakan bahwa:

“Tujuan Pelatihan Kader politik yang dilaksanakan oleh Wanita Persatuan Pembangunan adalah untuk mencetak kader-kader perempuan PPP serta mampu berkiprah di bidang politik dalam partai terutama dalam proses pengambilan keputusan (Decision Maker), dengan dilaksanakannya pelatihan yang berjenjang ini diharapkan dapat mencetak kader-kader perempuan yang potensial di seluruh tingkatan sehingga untuk pencapaian target 30% calon legislatif sesuai undang-undang Pemilu yang disempurnakan bisa dipenuhi oleh PPP diseluruh tingkatan.”⁶⁹

Selama ini Stigma “Partai Laki-laki” sangat melekat pada Partai Persatuan pembangunan hal ini dapat di lihat dari persentase kader perempuan yang duduk di kepengurusan khususnya pengurus harian di semua tingkatan pada periode kebelakang masih dibawah 10%, ini di karenakan belum mencukupinya sumber daya kader perempuan di tubuh partai untuk bisa bersaing atau bahkan untuk bersanding dengan laki-laki.

Karena hal inilah PPP mengeluarkan kebijakan untuk kader perempuan mendirikan lembaga sayap partai yang bernama Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dalam WPP lah Perempuan dapat ikut serta meenyiapkan kader perempuan partai yang tangguh, memiliki laoyalitas yang tinggi Propesional, Berkarakter, dan mempunyai kedekatan dengan peserta pemiliu (*Konstituen*).

⁶⁸Wawancara pribadi dengan Ibu Nurhayati Payapo pada tanggal 16 Agustus 2008 Jam 12.00-13.00 bertempat di Rumah Sakit Islam (YARSI) Cempaka Putih.

⁶⁹Sambutan Ketua Umum PP Wanita Persatuan Pembangunan Nurhayati Payapo pada tanggal 30 Januari 2008 dalam manual Pelatihan Kader Politik Perempuan Tingkat Propinsi di Jakarta

Ketua bidang OKK Epron Pangkapi berpendapat bahwa “kaderisasi merupakan bagian dari proses regenerasi dalam tubuh partai dengan kesiapan kader sebagai sumber daya politik diharapkan mampu mmbawa PPP mewnjadi partai agen perubahan bangsa Oleh karena itu kaderisasi sebagai wahana rekrutment politik sekaligus sarana untuk meningkatkan kualitas kader bangsa dan memenuhi kebutuhan kepemimpinan partai dalam jangka panjang dengan memperhatikan kesetaraan dan kesadaran gender”.⁷⁰

Kebijakan partai setelah muktamar IV berbeda, jika pada muktamar sebelumnya departemen wanita melebur dalam partai akan tetapi hasil muktamar berubah dengan menjadikan departemen wanita sebagai lembaga otonom dengan demikian ada kesempatan yang lebih besar bersama-sama perempuan lain untuk mengejar target. Topik pemberdayaan perempuan sekarang menjadi agenda dari partai Persatuan Pembangunan.

B. Partai Persatuan Pembangunan dan Masalah Amandemen Undang-Undang Partai Politik Tentang Peran Perempuan

Tahun 2003 tepatnya pada hari selasa tanggal 18 Februari merupakan hari sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia khususnya perjuangan mereka dalam dunia politik. Setelah bertahan-bertahan berjuang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah publik hasil akhirnya dengan dicantumkannya persoalan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen di mana tercantum dalam batang tubuh undang-undang Pemilu pasal 65 ayat 1, yang berbunyi

“ Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah

⁷⁰ Sambutan Ketua bidang OKK Bpk Epron Pangkapi pada tanggal 30 Januari 2008 dalam manual Pelatihan Kader Politik Perempuan Tingkat Propinsi di Jakarta

pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”⁷¹

Pencantuman secara tegas angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen hanyalah tindakan khusus sementara (*alternative action*) sampai perempuan mampu mengejar ketertinggalan kaum laki-laki dan juga merupakan batu loncatan untuk perempuan dalam lembaga khusus formal lainnya seperti Partai Politik.

Tidak mudah menjadi partai politik saat ini, banyak ketentuan yang menguji kesiapan dan keseriusan partai untuk bisa memenuhi aspirasi rakyat yang digembar-gemborkannya. Salah satu ketentuan yang sempat membuat repot partai adalah tentang calon legislatif perempuan. Dalam Pasal 8 ayat (1) butir (d) UU No 10/2008 tentang Pemilu, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa partai politik

dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Dengan peraturan tersebut, berarti partai politik harus berusaha keras menarik perempuan dan mempercayai para perempuan untuk duduk dalam kepengurusan di tingkat pusat, tidak hanya untuk internal partai, akan tetapi perempuan harus diikutkan pada kontestasi dalam pemilu legislatif. Pada pasal 15 dan 53 mewajibkan partai untuk mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan di dalam daftar calon legislatifnya.

Berarti, lagi-lagi mesin partai politik harus bekerja untuk menjaring perempuan \menjadi caleg. Selama ini, tindakan pengukuhan (*affirmasi*) untuk

⁷¹Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 169.

perempuan banyak dikritik karena tetap menyulitkan perempuan terpilih sebagai anggota legislatif. dikarenakan Partai Politik memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan nomor urut seluruh calegnya masing-masing.

Biasanya Calon-calon legislatif perempuan hanya digunakan sebagai 'aksesori' dengan menjadikan mereka sebagai caleg, tapi diletakkan bukan di 'nomor jadi', melainkan caleg perempuan banyak yang menjadi caleg nomor sepatu. Situasi itu menyulitkan perempuan untuk terpilih karena meski banyak pendukung, namun jika tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP), suara itu di ambil caleg di nomor jadi.

UU Pemilu yang baru menjawab kritik itu. Melalui Pasal 5 ayat (2), partai politik diwajibkan untuk memasukkan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan pada setiap tiga nama caleg yang diajukan. Jadi, kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi caleg emakin besar Melalui UU tersebut, keterwakilan perempuan di Indonesia diharapkan dapat terdongkrak, akan tetapi, bagi partai politik, UU Pemilu yang baru tersebut berarti kerja ekstra keras.

Perempuan adalah pihak yang secara kultural masih “jauh” dari dunia politik. Politik adalah ranah publik, sedangkan citra perempuan masih terbangun di sekitar ranah privat dan domestik. Oleh karena itu, perlu kerja mesin parpol untuk menyosialisasikan pentingnya perempuan terjun ke ranah politik.

Dalam konteks inilah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan untuk duduk di dalam kepengurusan partai, baik di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPW), maupun kabupaten/kota (DPC).

Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali mengatakan "Tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di PPP. Yang penting bagaimana kader perempuan meningkatkan kualitas, karena nanti pasti akan dicari-cari karena dibutuhkan partai,"⁷², Ia berharap kader perempuan PPP bisa ikut berperan dalam meningkatkan perolehan suara PPP pada Pemilu, antara lain dengan menjaga "suara" di keluarga dan tetangga sekitar..⁷³

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memaksimalkan peran kaum perempuan untuk merealisasikan target perolehan suara sebesar 15% pada Pemilu 2009. Langkah ini akan efektif, karena kaum perempuan dinilai lebih punya komitmen dalam menjalankan amanah partai. Menteri Negara Koperasi dan UKM menambahkan, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan mesin politik partai dalam bentuk optimalisasi rekrutmen dan proses kaderisasi dalam partai.

Saat ini PPP memiliki dua organisasi perempuan yakni, wanita persatuan pembangunan (WPP) dan ikatan silaturahmi istri (Ikastris). WPP merupakan organisasi yang masuk struktur PPP mulai dari pengurus pusat hingga cabang. Sedangkan, Ikastris merupakan lembaga non struktur. "Tugas kader perempuan adalah menyolidkan anggota keluarga untuk tetap di PPP"⁷⁴.

Setelah pengesahan undang-undang partai politik tahun 2003 di keluarkan PPP berusaha untuk meningkatkan kualitas kader-kader perempuan PPP dengan memberikan pelatihan politik kepada semua kader perempuan di setiap tingkatan yang dilaksanakan oleh Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Wanita Persatuan

⁷²Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, di hadapan sekitar seratus orang peserta "Pelatihan Kader Perempuan Politik" yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, "Artikel diakses pada tanggal 10 Agustus 2008 di <http://www.antara.co.id/arc/2008/3/30/ppp-tak-diskriminasikan-wanita-duduki-kepengurusan-partai/>

⁷⁴Artikel di akses pada tanggal 10 Agustus 2008 di <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/21/1/102339/ppp-akan-maksimalkan-peran-perempuan>

pembangunan adalah organisasi sayap kanan Partai Persatuan Pembangunan yang berlandaskan Al-Quran Hadist, AD/ART PPP,

Program perjuangan Partai, PD/PRT WPP. WPP bertujuan untuk Terwujudnya Kader-kader wanita Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, Berilmu, beramal, Terampil dan bertanggung Jawab serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terwujudnya kader wanita Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban menurut ajaran Islam, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Selanjutnya terwujudnya wanita Indonesia yang mempunyai kesadaran politik dan berwawasan kebangsaan, Selanjutnya Visi yang dibawa oleh WPP sebagai organisasi sayap kanan PPP adalah Terwujudnya masyarakat adil makmur, terampil, dan berwawasan luas yang berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁷⁵

Kebijakan partai setelah amandemen undang-undang partai politik tentang kuota 30% keterwakilan perempuan selain mendukung WPP dalam setiap pelatihan dan rekrutmen kader, partaipun memberikan persentase tambahan bagi perempuan untuk duduk dalam kepengurusan, jika pada awal-awal PPP hanya memberikan persentase dibawah 10% maka kedepannya PPP akan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di setiap tingkatan.

Untuk tingkat pusat sebanyak 7 orang dari 37 Pengurus harian atau sekitar 19 %, untuk tingkat wilayah sebanyak 5 orang dari 23 pengurus harian atau sekitar 22%, untuk tingkat cabang sebanyak 4 orang dari 21 pengurus harian atau sekitar

⁷⁵Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan, “Program Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)”, WPP PPP, Januari 2008, hal.1

19% , untuk tingkat anak cabang 2 orang dari 17 pengurus harian atau sekitar 12%, dan untuk tingkat ranting sebanyak 1 orang dari 13 pengurus harian atau sekitar 7%.

C. Pasang Surut dan Peranan Kader Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pasang surut perjalanan peran perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan. Banyak kader perempuan yang memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap partai, akan tetapi penulis hanya akan membahas beberapa tokoh perempuan kader terbaik PPP

Di tahun awal berdirinya PPP hadir tokoh perempuan yang selalu siap memperjuangkan martabat perempuan, dia juga sudah mulai aktif dalam organisasi semenjak muda, dia lahir di Padang pada tanggal 1 Desember 1933. Beliau adalah Aisyah Aminy. Karena kearifan dan potensi yang beliau berikan di PPP, pada muktamar PPP tahun 1984 ia terpilih menjadi ketua DPP PPP, pada tahun itu Aisyah merupakan perempuan pertama dari kader partai yang menduduki jabatan ketua DPP.

Dalam bidang politik praktis pada saat itu memang jarang perempuan yang menduduki posisi ketua dalam partai politik Islam, kemudian berturut-turut Aisyah mendapatkan posisi yang strategis seperti wakil ketua MPP PPP periode 1989-1994, ketua DPP PPP periode 1994-1999 dan yang terakhir beliau menjabat sebagai wakil ketua Majelis Pakar PPP pada tahun 1999.

Periode 1987-1992, Aisyah menjadi anggota DPR/MPR RI. Ia duduk di Komisi II yang membidangi masalah Politik Dalam Negeri dan Pertanahan. Di masa jabatannya ini, Aisyah banyak melontarkan kritik terhadap pemerintah, di antaranya disampaikan langsung dalam dialognya dengan Menteri Dalam Negeri, agar pemerintah tidak memaksa rakyat memilih Golkar.

Tahun 1992-1997, Aisyah dipercaya sebagai anggota DPR/MPR RI dan duduk di Komisi I. ia dipercaya sebagai ketua Komisi I yang ketika itu membidangi Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri dan Penerangan. Periode 1997-1999, ia kembali dipercaya sebagai ketua Komisi I. ia adalah perempuan pertama yang menjadi ketua komisi ini. Setelah tidak menjadi ketua Komisi I DPR/MPR, periode 1999-2004, Aisyah dipercaya F-PP duduk dalam Badan Pekerja MPR sebagai wakil ketua Panitia Ad Hoc II, yang mempersiapkan rancangan ketetapan-ketetapan selain GBHN dan Perubahan UUD 1945.

Selama perjalanan beliau banyak yang memberikan tanggapan dan pandangan dari kalangan tokoh politik tentang bagaimana sepak terjang peran beliau dalam perpolitikan di Indonesia khususnya peranan beliau dalam perkembangan PPP. Ibu Aisyah Hamih Baidlowi contohnya beranggapan

“Sebagai pengurus teras PPP dan kedudukannya sebagai anggota DPR selama beberapa periode sampai sekarang kehadiran dan peranan Aisyah Aminy menonjol di tengah dominasi kaum laki-laki di pentas politik, ia dapat menerobos lingkaran politik kaum laki-laki yang dikarenakan beliau memiliki kemampuan yang setara dengan kaum laki-laki, apabila pada suatu hari ia pernah menjadi ketua komisi I DPR tentunya tidak lepas kemampuannya sebagai Politisi yang diakui banyak pihak yang berlangsung pada masa pemerintahan Soeharto di mana masa itu sulit menerima kehadiran “kaum oposisi” sementara PPP adalah

partai di mana Aisyah Aminy bergabung didalamnya merupakan “partai oposisi” yang kritis terhadap pemerintah. sementara mengenai sepak terjang politisi dan perempuan parlemen Aisyah menjadi pendorong untuk menyoroti hal yang sangat penting bagi kaum perempuan Indonesia dalam memperjuangkan peran perempuan untuk tampil di panggung politik berdampingan dengan kaum laki-laki dan beliau juga yang paling spesifik menyoroti perihal keterwakilan perempuan dalam parlemen.⁷⁶

Di kalangan PPP Aisyah Aminy di kenal sebagai wanita yang tangguh, gigih, cermat, analitis, namun juga sistematis ketajamannya dalam berpendapat tidak ada yang meragukan terutama dalam menguasai topik beliau seringkali memaparkan dengan sangat gambalng dan panjang lebar serta sukar untuk dapat di bantah dan tidak heran jika PPP selalu mengandalkan Aisyah Aminy sebagai ujung tombak pendapat partai dalam berbagai forum baik MPR maupun DPR dan bagi PPP Aisyah Aminy adalah kebanggaan partai

.Selain Aisyah Aminy tokoh perempuan lain yang berasal dari kalangan NU yang berjuang bersama Aisyah dalam pemberdayaan perempuan pada waktu itu dan juga aktif dalam organisasi perempuan yaitu Ibu Asmah Sjachruni.. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1927. Asmah Sjachruni tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berlatar keluarga ahli sunnah wal jama’ah.

Karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berlatar belakang ahli sunnah wa Jama’ah, maka beliau aktif dalam organisasi perempuan NU yaitu Muslimat NU. Sejak tahun 1956 hingga tahun 1987 beliau telah menjadi anggota

⁷⁶Ramli dan Yusuf ed, *Aisyah Amini Demokrasi Tanpa Batas (Jakarta: Lembaga Study Pembangunan Indonesia, 2002)*, hal. 253

DPR RI dan bergabung dalam komisi F yang membidangi agama, sosial, kesehatan dan pendidikan dari partai NU.

Setelah NU berfusi dengan 3 partai Islam lainnya ke dalam PPP, Asmah Sjachruni bergabung kedalam anggota dewan dari F PP. Pada tahun 1982 Asmah berada dalam komisi VII yang membidangi keuangan, perbankan, bulog, dan perdagangan.

Selama menjadi Anggota DPR dari F PP Asmah Sjachruni pada tahun 1974 merupakan perumus dari UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selama proses pembentukan UU Perkawinan tersebut, Asmah Sjachruni merupakan tokoh perempuan yang tegas dan kritis serta merupakan tokoh yang sangat memiliki peran yang menonjol dalam mengambil keputusan. walaupun dalam perjalanan undang-undang tersebut masih menyisakan beberapa masalah yaitu tentang perkawinan antar agama dan perkawinan menurut tata cara aliran dan kepercayaan yang di anggap sah dalam agama yang di anut.

Selama menjadi anggota DPR Asmah Sjachruni banyak memberikan perhatian yang cukup intens pada masalah pendidikan, Kesehatan, sosial, agama, NU, dan juga sosial politik. Beliau merupakan salah satu tokoh PPP yang memiliki insting politik yang kuat dan satu-satunya perempuan yang di beri gelar “singa podium”

Selama perjalannya beliau di PPP Asmah Sjachruni merupakan tokoh yang berperan dalam melawan Naro karena pada saat itu PPP di bawah kepemimpinan Naro di anggap banyak merugikan NU. Kepemimpinan PPP

kemudian tidak lagi mencerminkan kekuatan ril partai yang berfusi⁷⁷. Pada akhir masa baktinya di DPR tahun 1987 Asmah Sjachruni bergabung bersama kelompok yang menentang Naro

Bersama H. Nuddin Lubis (Wakil Ketua DPR), H. Soedardji (ketua fraksi PPP) H.B.T Achda (bendahara Fraksi), dan Moenasir. PPP pada saat itu terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu DPP PPP dan kubu Fraksi PPP. Puncaknya adalah Naro melakukan recolling dan pencoretan nama-nama dari daftar calon sementara anggota DPR. terhadap sejumlah anggota FPP yang bersebrangan dengannya termasuk Asmah Sjachruni.

Selama perjalanan beliau banyak yang memberikan tanggapan dan pandangan dari kalangan tokoh politik baik dari kalangan PB NU, Muslimat NU, hingga anggota DPR mereka semua memberikan pandangan bagaimana sepatutnya peran beliau dalam perpolitikan di Indonesia khususnya peranan beliau dalam PPP.

Diantaranya adalah Aisyah Aminy yang berpendapa; "Asmah Sjachruni adalah tipe orang yang bias bergaul dengan siapapun dan dari manapun, saya dan ibu Asmah memiliki kecocokan terutama pemikiran kami sewaktu sama-sama aktif di PPP. Tahun 1977 ketika saya menjadi anggota MPR, beliau sudah berada di DPR. di PPP kami menginginkan bagaimana partai itu bias dibesarkan dengan melakukan perjuangan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan dan kami mendiskusikan tentang kemungkinan tokoh perempuan untuk bisa duduk di jajaran pimpinan harian partai. Dan hasil diskusi kami tentang kemungkinan itu akhirnya tahun 1984 bisa saya realisasikan.

⁷⁷Yang dimaksud tidak lagi mencerminkan kekuatan ril partai yang berfusi adalah Parmusi yang mengantungi suara kurang separuh dari kursi NU justru muncul sebagai pemimpin partai tersebut, dan Naro yang di dukung penguasa kala itu dengan berani mengurangi jatah kursi NU di kantong-kantong NU dengan Keterangan tersebut dapat di lihat dalam buku: Asmah Sjachruni, *Muslimah Pejuang Lintas Zaman Dari Kalangan Nahdatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hal.55

Bagi saya ini merupakan suatu fenomenal yang luar biasa ketika menyaksikan bahwa di lingkungan NU yang selama ini dikenal sebagai kelompok yang tradisional akan tetapi kenyataannya hadir Ibu Asmah dengan kepemimpinannya di Muslimat NU memberikan warna yang “maju”, dan wajar jika beliau diberikan kepercayaan cukup lama oleh kaum laki-laki (kiyai) untuk duduk di DPR baik sejak mewakili PPP maupun jauh sebelumnya ketika mewakili partai NU karena mereka memiliki visi yang sama terutama dalam memperjuangkan visi Islam, Partai, maupun dalam rangka membesarkan NU”⁷⁸

H. Amidhan yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesai dan mantan Dirjen Bimas Islam Islam dan urusan haji Departemen Agama memberikan pandangan beliau tentang bagaimana kiprah Asmah Sjachruni.

Beliau berpendapat; “Di dalam perpolitikan umat beliau di pandang sebagai politikus yang handal, selama lima periode beliau malang melintang di DPR RI mewakili partai NU kemudian PPP. Beliau lebih menunjukan sebagai tokoh Nasionalis dari kalangan umat Islam. Hal itu ditunjukkan ketika memperjuangkan lahirnya UU Perkawinan pada akhir tahun 1973. UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini satu-satunya UU nasional yang menjadi kebanggaan umat Islam.

Sebagian tokoh Islam menyebut Fiqih Islam Moderen dalam bab Munakahah yang juga menonjol diperjuangkan oleh beliau adalah nasib kaum perempuan, dan martabat kaum perempuan, demikian dihargai dalam UU tersebut sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Selama duduk di MPR/DPR sesuai dengan komisi yang diikutinya tidak hanya di bidang agama tapi juga di bidang-bidang lainnya beliau dipandang handal dan berbobot oleh kawan dan lawan politiknya.”⁷⁹

Perjalanan Politik Asmah Sjachruni di PPP berakhir pada tahun 1984

beliau memutuskan istirahat dari partai dan memutuskan untuk berperan di luar partai melalui organisasi Perempuan yang beliau pimpin yaitu di Muslimat NU. Di era Reformasi menjelang pemilu 1999 Asmah Sjachruni menjadi salah satu

⁷⁸Asmah Sjachruni, *Muslimah Pejuang Lintas Zaman Dari Kalangan Nahdatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hal.108-110

⁷⁹Asmah Sjachruni, *Muslimah Pejuang Lintas Zaman*, hal 127-128

deklarator dan menduduki jabatan salah satu ketua dalam Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang ketua umumnya KH. M. Yusuf Hasyim.

Regenerasi berlanjut dalam tubuh PPP, menjelang akhir era Orde Baru hadir Khafifah Indarparawansa. Ia lahir di Surabaya, 19 Mei 1965, Khofifah bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1992-1998 sebagai anggota dewan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, setelah dibukanya sistem multipartai ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Khofifah memulai aktivitas politiknya sejak masa kuliah dengan bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan pernah menjadi ketua umum di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Selama menjadi kader PPP Kohafifah merupakan kader muda yang sangat vokal, kritis, dan memiliki retorika yang baik, selama menjadi anggota dewan di dalam F PP periode 1991-1997 Khofifah merupakan kader yang lantang mengeluarkan pendapatnya di setiap rapat sidang di DPR baik menjadi Panitia khusus maupun Panitia Kerja dalam perumusan UU maupun rapat-rapat komisi dalam DPR.

Sebagai kader PPP dan menjadi anggota dalam F PP di DPR pada tahun 1991-1997 Khafifah selalu lugas dan tepat serta kritis dalam mengeluarkan gagasan dan pendapat di setiap sidang contohnya bersama Ahmad Paris, Hadimulyo, Oesman Sahidi, Hj Nadiniyah Kewusnendar, dan Muslim Ridho Khofifah menjadi Panitia Khusus (Pansus) proses pembahasan rancangan Undang-undang tentang Narkotika tahun 1996-1997,

Sebagai kader PPP ia membawa visi terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia Khofifah menjadi juru bicara dalam rapat perumusan undang-undang bersama Hadimulyo dalam penyampaian pengantar hasil musyawarah untuk menyampaikan masalah-masalah yang akan di bahas dalam rapat. dibandingkan dengan Pansus dari Fraksi lain, beliau terlihat lebih analitis dan sistematis dalam menyampaikan pandangan umumnya

Khofifah berpendapat dalam pengantar musyawarah tersebut bahwasanya; Kecemasan masyarakat Internasional terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika merupakan kekhawatiran kita juga, karena Indonesia secara demografis sebagian besar penduduknya berusia muda, yang rentan terhadap berbagai kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk inilah kita memerlukan upaya secara sistematis, konseptual, serta tindakan oprasional secara komperhensif. Kita perlu waspada, karena pada saat ini diperkirakan Indonesia bukan lagi sebagai negara transit akan tetapi sudah menjadi negara tujuan sehingga kita memerlukan berbagai langkah antisipatif.

Menurut FPP kita perlu berhati-hati dalam merumuskan peraturan perundang-undangan serta kibijakan yang berkaitan dengan narkotika. Seperti kita ketahui narkotika adalah zat atau obat yang memiliki dua sisi yang bersifat kontradiktif yakni di satu sisi narkotika merupakan obat, tetapi jka disalah gunakan akan berbahaya dan merusak manusia baik secara fisik maupun mental Oleh karena itu jangan sampai kebijakan ini terlalu ketat atau terlalu longgar.

Dalam pembicaraan tahap III ini FPP untuk memperhatikan beberapa materi naskah RUU Tentang Narkotika yaitu dalam BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua tentang Penyaluran, Pasal 24 ayat 4 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap penyimpangan ketentuan pelaporan Narkotika di hapuskan, agar tidak rancu dalam pasal 34, Pasal 77 ayat 2 tentang importir dan eksportir tanpa persetujuan pemerintah di pidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 60 juta, FPP sepakat dengan hasil konvensi United Convention Agiants Iccit trafic and narkoticdan untuk memudahkan pihak manapun dalam memahami naskah undang-undang maka sistematiknya perlu disempurnakan. Hal-hal penting yang membutuhkan penekanan dan perlu mendapatkan perhatian khusus hendaknya di rumuskan dalam

*bab atau bagian khusus seperti soal hansip, perusahaan dan sebagainya.*⁸⁰

Selama proses perancangan UU tentang Narkotika dari tanggal 23 Januari 1997- 24 Juli 1997 Khofifah selalu memberikan ide-ide yang di perhitungkan oleh fraksi lain, dia juga selalu memberikan saran kepada Team Perumus dan di bahas dalam sidang panitia kerja yang di hadiri oleh 40 orang dari 4 Fraksi DPR RI dan 9 orang dari Pemerintah

Selama proses persidangan berlangsung Khofifah di bantu oleh dua rekannya yaitu Hadimulyo dan Oesman Sahidi selalu siap tampil memberikan saran dan pendapat serta tanggapan secara kritis baik kepada rekannya sesama fraksi maupun fraksi lain dan pemerintah.

Selama menjadi kader PPP Khofifah telah menjadi kader perempuan muda yang di banggakan oleh PPP karena kecerdasannya dalam menyampaikan pendapat dan lantang mengkritisi setiap poin-poin pembahasan dalam sidang di DPR, akan tetapi setelah hadirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki visi dan misi yang lebih sejalan, akhirnya Khofifah keluar dari PPP dan masuk ke dalam PKB

Kemerosotan SDM kader perempuan PPP berawal Setelah Muktamar ke 27 di Situbondo tahun 1984 maka kaum perempuan NU yang aktif dalam PPP lebih menyebar ke berbagai organisasi politik seperti; Mantan Ketua Umum PP Muslimat NU Aisyah Hamid Bidlowi bergabung ke dalam partai Golkar dan

⁸⁰Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, DPR-RI, 1997), hal. 187-190

bergabung ke dalam Fraksi Golkar DPR RI, Mahfudloh Aly Ubaid adalah fungsionaris DPP PPP, Umroh Tolhah Mansur yang awalnya adalah anggota DPR RI FPP sekarang menjadi Fungsionaris DPP PKB dan anggota F-KB DPR-RI dan terakhir Khofifah Indarparawansa pernah menjadi bagian dari PPP dan seorang ketua Departemen PP Muslimat NU kemudian menjadi Ketua Umum Muslimat NU kemudian bergabung dan menjadi salah seorang ketua DPP PKB .

Partai Persatuan Pembangunan memang memiliki tokoh perempuan yang siap bersaing dengan laki-laki di pentas politik, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit itu di tegaskan oleh ketua DPP PPP bidang pemberdayaan perempuan Nurhayati Payapo.

“Sebenarnya dinamika peran perempuan dalam partai itu sedikit terhambat pada awalnya, itu dikarenakan minimnya jumlah kader perempuan dalam partai, sehingga proses kaderisasi dalam partai yang bertujuan menyiapkan kader-kader yang siap tampil di pentas politik baik sebagai calon pejabat pemerintahan hingga hanya sebatas aktivis politik perempuan. Yang saya maksud dengan “siap” di sini adalah siap baik secara sikis maupun fisik”⁸¹

lapun menambahkan kenapa dalam partai proses peran perempuan terhambat

“ Proses kaderisasi yang sedikit terhambat juga disebabkan oleh animo perempuan yang tidak terlalu antusias dalam politik karena pola berfikir mereka yang terbentuk adalah pola berfikir yang tradisional dalam masyarakat dahulu di mana tempat perempuan itu adalah Dapur, Sumur, dan kasur, tetapi seiringnya waktu akhirnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam PPP semakin berkurang yang disebabkan

⁸¹Wawancara pribadi dengan Ibu Nurhayati Payapo pada tanggal 16 Agustus 2008 Jam 12.00-13.00 bertempat di Rumah Sakit Islam (YARSI) Cempaka Putih

*dinamika politik Indonesia yang berubah, dan juga kesadaran perempuan untuk tampil dalam ranah politik yang semakin meningkat*⁸²

Selanjutnya Ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali menambahkan, partai yang dipimpinnya kekurangan kader perempuan. Karena itu, jika nantinya syarat keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% diwajibkan, PPP akan mengalami kesulitan, meski demikian, pihaknya mendukung adanya keterwakilan perempuan di DPR.

"Pada prinsipnya kita mendukung gagasan itu. Tapi kalau diwajibkan nanti akan menemui kendala di lapangan. Sebab, tidak sedikit parpol yang kekurangan kader perempuan. PPP tidak mau melakukan diskriminasi politik antara laki-laki dan perempuan., PPP memberikan hak yang sama kepada seluruh kader, PPP lebih melihat pada kemampuan kader untuk didukung menduduki jabatan-jabatan politik. Jadi kita tidak melihat perbedaan gender, tapi pada kualitas masing-masing figur,"

Untuk menyalahi kekurangan kader perempuan, PPP akan merekrut tokoh-tokoh nonkader untuk dicalonkan sebagai anggota DPR. Mengenai penyebab minimnya kader perempuan di PPP, disebabkan karena regenerasi PPP masa lalu jalan di tempat. Karena itu, PPP akan melakukan regenerasi secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga ranting.

Selanjutnya program yang di buat oleh partai untuk meningkatkan jumlah kader perempuan dalam partai adalah dengan pembentukan organisasi sayap yang fokus dalam pemberdayaan perempuan. Yang bernama Majelis Taklim Maratus Sholihah. dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

⁸²Wawancara pribadi dengan Ibu Nurhayati Payapo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang kuat dengan dominasi kaum laki-laki, secara kuantitas keterlibatan perempuan di dalam partai mengalami kemerosotan kader perempuan PPP, yang berawal Setelah Muktamar ke 27 di Situbondo tahun 1984 mengakibatkan kader perempuan NU yang aktif dalam PPP menyebar ke berbagai organisasi politik

Selanjutnya dari data yang penulis temukan, dinamika peran perempuan dalam partai sedikit terhambat, yang disebabkan minimnya jumlah kader perempuan dalam partai yang mengalami regenerasi kader PPP masa lalu yang jalan di tempat

dan mengakibatkan proses kaderisasi dalam partai yang bertujuan menyiapkan kader-kader yang siap tampil di pentas politik baik sebagai calon pejabat pemerintahan hingga hanya sebatas aktivis politik perempuan terhambat

Kemudian dalam perjalanannya politisi perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan jumlah keterlibatan perempuan sangat minim dibandingkan dengan politisi laki-laki, maka hasil yang diraih dalam partai maupun parlemen secara persentase masih kecil, hanya ada beberapa orang diantaranya adalah Aisyah Aminy dan Asmah Sjachroni.

Walaupun demikian kedua orang itu mempunyai reputasi yang cukup baik dibandingkan dengan politisi-politisi perempuan dari partai politik lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterlibatan mereka didalam pengambilan

keputusan dan pembentukan rancangan beberapa undang-undang yang berpengaruh dan bermanfaat bagi kaum perempuan hingga sekarang.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 1987-1992 dan tahun 1997-1999, Aisyah menjadi anggota DPR/MPR RI. Komisi II yang membidangi masalah Politik Dalam Negeri dan Pertanahan, tahun 1992-1997 Aisyah menjadi anggota DPR/MPR RI Komisi I sebagai ketua Komisi membidangi Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri dan Penerangan, tahun 1999-2004, Aisyah dipercaya untuk duduk dalam Badan Pekerja MPR sebagai wakil ketua Panitia Ad Hoc II, yang mempersiapkan rancangan ketetapan-ketetapan selain GBHN dan Perubahan UUD 1945.

Selanjutnya Asmah Sajchroni, pada tahun 1974 merupakan perumus dari UU no 1 tahun 1974 undang-undang Perkawinan, selama proses pembentukan UU Perkawinan tersebut, Asmah Sjachruni merupakan tokoh perempuan yang tegas dan kritis serta merupakan tokoh yang sangat memiliki peran yang menonjol dalam mengambil keputusan

Tahun 1982 menjadi anggota DPR/MPR RI komisi VII yang membidangi keuangan, perbankan, bulog, dan perdagangan, selama menjadi Anggota DPR Selama menjadi anggota DPR Asmah Sjachruni banyak memberikan perhatian yang cukup intens pada masalah pendidikan, Kesehatan, sosial, agama, NU, dan juga sosial politik. Beliau merupakan salah satu tokoh PPP yang memiliki insting politik yang kuat dan satu-satunya perempuan yang di beri gelar "singa podium" dan akhirnya Perjalanan Politik Asmah Sjachruni di PPP berakhir pada tahun 1984

Saran

Untuk itu diperlukan upaya-upaya sistematis bagi peningkatan peran politik perempuan melalui sejumlah tawaran sebagai berikut:

Pertama: Mengubah budaya patriarki yang menekankan perspektif maskulin dalam melihat persoalan masyarakat yang tidak kondusif bagi peningkatan peran politik perempuan, di masyarakat budaya ini dipertegas melalui justifikasi agama. Sejumlah penafsiran agama yang dianut di masyarakat masih mempermasalahkan bolehnya perempuan aktif dalam bidang politik.

Ketiga : Representasi anggota DPR ataupun pengurus harian dalam partai harus mencerminkan realitas masyarakat yang diwakilinya, sebagai sebuah negara yang sebagian besar penduduknya adalah kaum perempuan, maka baik pegegang kekuasaan legilatif maupun pengambil kebijakan dalam partai harus memperhatikan betul aspirasi dan kepentingan kaum perempuan. Dan harus mewujudkan relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan untuk menjabarkan berbagai program yang tepat.

Keempat : Perlu komitmen yang kuat untuk menjadikan lembaga-lembaga perempuan dalam partai politik sebagai *liding Sector* untuk melakukan pemberdayaan perempuan baik untuk merubah situasi dan kondisi internal partai politik agar lebih ramah terhadap perempuan, maupun menunjukkan komitmen dan kepedulian partai politik terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang disebabkan ketimpangan relasi perempuan yang masih berkembang di masyarakat.

Lima : untuk meningkatkan jumlah kader perempuan dalam partai pengambil kebijakan dalam pengurus partai disemua tingkatan memberikan ruang persentasi jumlah kader perempuan untuk bisa duduk di kursi pengambil kebijakan partai disemua tingkatan.

Tujuh: Mendukung penuh seluruh program yang di buat oleh *wing organisation* partai yang konsen dalam pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kader perempuan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ciputat: Logos Wacana Baru, 1999.

Abdul, Bari Azed dan Amir, Makmur. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Ahmad, Masruch Nasuha. *Kaum Perempuan Dalam Pembelaan Islam*. Semarang: PT Toha Putra, 1984.

Al, Jawad Haifa. *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atau Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2002.

Ali, Fachri. *Refleksi Faham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: T:pn, 1986.

Ali, Hosein Hakem dkk. *Membela Perempuan*. Jakarta: Al-Huda, 2005.

Ahmad, Abidin Zaenal. *Ilmu Politik Islam IV: Perkembangan Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Amir, Zaenal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.

Asghar, Ali Enginer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Bentang, 1994.

DPR RI. *Proses Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Jederal DPR RI, 1997

_____. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peraturan daerah dan Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan*

Daerah. Jakarta: Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 2006

_____. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.*

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan gender Dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.*

Goddarad, Eictoria Anna, ed. *Gender Agency and Change Antropological Perspectives. London and New York: Routledge, 2000.*

Hadimulyo, ed. *Kepedulian PPP Terhadap Kaum Pekerja. Jakarta: DPP PPP, 1996.*

H.M., Ranti dan Yusuf, ed. *Aisyah Aminy Demokrasi Tanpa Batas. Jakarta: Lembaga Study Pembangunan Indonesia, 2002.*

Irwan, Alex. *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan. Jakarta: APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.*

J.A, Denny. *Partai Politik Pun Berguguran. Yogyakarta: LKiS, 2006.*

Karim, M Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik Suatu Kajian mengenai Implikasi kebijakan pembangunan bagi keberadaan "Islam Politik" Di Indonesia era 1970-an-1980-an. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.*

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1993.*

Kuntowidjoyo. *Pengantar ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bntang, 1995.*

Liddle, B William. *Partisipasi dan Partai Politik Inonesia Pada Awal Orde Baru*.

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.

Lewis, Bernard. *Bahasa Politik Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Louis, Gottschalk. *Mengerti sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Maarif, Safii Ahmad. *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka DINAMIKA, 1999.

Mahfiz, Irgan Chairul. *Nilai-Nilai Islam Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: Social Economic Indicator (SEI), 2008.

Mansur, Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1987.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEG-UI, 1977.

Metareum, Ismail Hasan. *Akhlakul Karimah Dalam Berpolitik Kumpulan Pidato Muswil III PPP*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.

Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. *Perempuan dan politik*. Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2005.

_____. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengahiri Depolitisasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

Muzakar, Atha. *Potret Perempuan Dalam Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: PSW UMY dan Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Naif, Umar fatimah. *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999.

Nasuhi, Hamid. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Jakarta: CeQDA UIN Jakarta, 2007.

Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grahitipress, 1987.

Politik Amar Ma'ruf Nahi Mungkar "Perjuangan dan Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000.

Rodja, Muhammad. *PPP Problematika dan Prospek*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Produktivitas, 1994.

Syamsuddin, Din. *Islam dan Politik era Orde Baru*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Sa'adah, Najmah dan Khatimah ,Khusnul. *Revisi Politik Perempuan Bercermin pada Shahabiyat*. Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003.

Sa'id, Al Afghani. *Pemimpin Wanita Dikancah politik* : Study Sejarah Pemerintahan Aisyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pustaka LP2IF, t.t.

Shafiyah, Amatullah Haryati, Soeripno. *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implimentasinya*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Siachruni Asmah. *Muslimah Pejuang Lintas Zaman Dari Kalangan Nahdatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. 2002

Sudiyarti, Luhulima Achie ed. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No 7 Tahun 2004 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Suroto dan Rudianto ,Deddy. *Partai-Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.

Waddy, Chair *Wanita dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.

Widyani, Soetjipto Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: KOMPAS, 2005.

ARTIKEL DAN JURNAL

Jurnal Perempuan., “Politik dan Keterwakilan Perempuan, Maret, 2004, AD Kusumaningtiyas: *Pemilu 2004 menagih Komitment Partai Politik Islam Untuk Demokrasi yang berkeadilan Gender*, Edisi 34. Jakarta: YJP, 2004

Bambang, Eko Subiantoro. “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Masih *Menjadi Kabar Burung*” Jurnal Perempuan. Edisi 34. Jakarta: YJP, 2004

Karma, Azza dkk. *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999

Wijaksana. *"Perempuan dan Politik Ketika yang personal adalah Konstitusional,*

Jurnal Perempuan. Edisi 34. Jakarta: YJP, 2004

Saraswati, tumben. *"Agenda Perjuangan Politik Perempuan melalui Parlemen"*

Jurnal Perempuan Edisi 35. Halo Senayan. Jakarta. YJP, (Mei,2004)

DOKUMEN

Undang-Undang RI No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Jakarta: DPP PPP. 1977

Himpunan Kutipan Muktamar !! Partai Persatuan Pembangunan. Jakarta: DPP
PPP 1989

Keputusan Muktamar III Partai Persatuan Pembangunan . Jakarta: DPP PPP. 1994

Ketetapan-ketetapan Muktamar IV Partai Persatuan Pembangunan. Jakarta: DPP
Partai Persatuan Pembangunan. 1999

INTERNET

<http://www.dpr.go.id>

<http://www.ppp.ac.id>

<http://www.jurnalperempuan.com>

<http://forum-politisi.org>

http://www.lbh-apik.or.id/penelitian_respon_agm_islam

Pedoman Wawancara

**Perempuan Dalam Partai Politik Islam di Indonesia Study Terhadap
Peranan Perempuan Dalam Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dalam
Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1972-2004**

1. Realisasi Undang-Undang Partai politik Tentang Amandemen Undang-Undang Partai Politik
 - a. Bagaimana pandangan partai tentang Pemberlakuan Undang-undang Partai Politik Pasal 65 Ayat 1 No 12 sebelum amandemen apakah sudah menunjukkan keadilan peran masyarakat dalam perpolitikan di Indonesia?
 - b. Bagaimana Kronologis dengan amandemen Undang-Undang Partai Politik pasal 65 ayat 1 no 12 apakah Perbedaannya Undang-undang Partai Politik dengan Undang-Undang Partai Politik sebelum amandemen menurut Partai Persatuan Pembangunan ?
 - c. Perihal Amandemen Undang-Undang Partai Politik Pasal 65 ayat 1 no 12 (Tentang Kuota 30%) Bagaimana respon Partai Persatuan Pembangunan Terhadap disahkannya amandemen Undang-undang Partai Politik yang Baru tersebut?
 - d. Bisa di ceritakan Bagaimana analisa Historis dalam Partai Persatuan pembangunan saat proses terbentuknya Amandemen Undang-Undang Partai Politik yang Baru dibandingkan dengan Platorm Partai Persatuan Pembangunan ?
 - e. Bagaimana Kebijakan Partai untuk merealisasikan Kesetaraan dan Keadilan gender Pasca Terbentuknya Amandemen Undang-Undang Partai Politik Pasal 65 Ayat 1 No 12 terkait dengan Kuota 30% Keterwakilan perempuan ?
1. Kebijakan Internal Partai Prihal Realisasi Kesetaraan dan keadilan gender Perempuan Dalam Partai Politik.
 - a. Bagaimana pendapat partai tentang kepemimpinan perempuan jika dilihat dari hukum syariat Islam, dan kebijakan apa yang partai

berikan dalam merealisasikan kepemimpinan perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan?

- b. Bagaimana realisasi keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal khususnya dalam Partai Persatuan Pembangunan?
- c. Berapa Persentase Jumlah Pengurus Perempuan dalam Partai, Khususnya posisi kepengurusan dalam partai baik dalam pengurusan DPP,DPW, DPC,PAC, ataupun PR Partai Persatuan Pembangunan?
- d. Berapa Persen Jumlah Posisi pengambil kebijakan yang di raih oleh Perempuan dalam Kepengurusan Harian ataupun departemen dalam Partai Persatuan Pembangunan?
- e. Bagaimana Representasi Perempuan Sebagai Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu terdahulu bila di urutkan dari Pemilu 1977-2004 adakah Progressifitas dalam pencalonan Caleg Perempuan tersebut?, Jika tidak apa hambatannya?
- f. Adakah Kebijakan atau peraturan dalam AD/ART Partai yang menyebutkan Bab ataupun undang-undang Khusus tentang keterwakilan ataupun Peran perempuan dalam Partai Politik, Berapa Kuota yang di berikan Partai dalam hal ini?

2. Prihal Kedudukan Perempuan dalam Partai

- a. Bagaimana Kedudukan Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan ?
- b. Seberapa banyak Jumlah Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Partai ?
- c. Bagaimana hubungan interaksi elite politik perempuan dan laki-laki dalam partai persatuan pembangunan?
- d. Usaha apa yang dilakukan perempuan dalam pengembangan partai persatuan pembangunan ?
- e. Jika di Komparasikan dalam hal loyalitas bagaimana kemitran antara perempuan dan Laki-laki dalam partai Persatuan pembangunan?
- f. Bagaimana Kredibilitas Perempuan dalam Partai PPP?

- g. Jika menghadapi kendala yang menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adakah program yang dibuat untuk masalah tersebut?
- . Apakah ada pendidikan atau diklat khusus Untuk kader perempuan di PPP?
 - . Apakah nama diklat atau pelatihan tersebut dan bagaimana tingkatannya?



Hasil wawancara Skripsi

**Perempuan Dalam Partai Politik Islam di Indonesia Study Terhadap
Peranan Perempuan Dalam Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dalam
Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1972-2004**

Nama Responden : Nurhayati Payapo
 Jabatan : Ketua DPP PPP Bidang Pemberdayaan Perempuan
 Ketua PP Wanita Persatuan Pembangunan
 Tanggal : 16 Agustus 2008
 Waktu : 12.00-13.00
 Tempat : RS Islam (YARSI) Cempaka Putih

1. Bagaimana pendapat partai tentang kepemimpinan perempuan jika dilihat dari hukum syariat Islam, dan kebijakan apa yang partai berikan dalam merealisasikan kepemimpinan perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan?

Jawab : *Partai Persatuan Pembangunan Tidak ada masalah perihal kepemimpinan perempuan karena dalam aturan main partai udah dicantumkan tentang itu dan dalam masalah kebijakan dalam AD/ART sudah di tetapkan bahwa perempuan memiliki kuota untuk menjadi pengambil kebijakan di Partai di setiap pengurus baik di tingkat pusat hingga ke cabang.*

2. Bagaimana realisasi keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal khususnya dalam Partai Persatuan Pembangunan?

Jawab : *Partai belum bisa memenuhi kuota perempuan sebesar 30% masih di bawah 20% yang bisa partai berikan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam tubuh partai, akan tetapi parttai mengantisipasi dengan menempatkan 7 orang perempuan sebagai bagian pengambil keputusan di dalam*

partai dengan pembagian 2 orang di unsur Ketua, 3 orang di unsur Sekretaris, dan 2 orang di unsur Bendahara.

3. Berapa Persentase Jumlah Pengurus Perempuan dalam Partai, Khususnya posisi kepengurusan dalam partai baik dalam pengurusan DPP,DPW, DPC,PAC, ataupun PR Partai Persatuan Pembangunan?

Jawab : *Dalam AD/ART Partai disebutkan bahwa untuk tingkatan pusat harus menempatkan perempuan sebanyak 7 Orang, untuk tingkat wilayah harus menempatkan perempuan sebanyak 5 orang, dan untuk tingkatan cabang harus menempatkan perempuan sebanyak 4 orang.*

4. Berapa Persen Jumlah Posisi pengambil kebijakan yang di raih oleh Perempuan dalam Kepengurusan Harian ataupun departemen dalam Partai Persatuan Pembangunan?

Jawab : *Untuk setiap tingkatan itu mulai dari 17%-25% contohnya untuk pengurus pusat di PPP perempuan yang menjadi pengurus itu ada 7 orang dari 37 atau sekitar 19% dan untuk tingkatan wilayah itu 5 orang dari 23 pengurus atau sekitar 22% dan tingkat cabang 4 orang dari 21 Pengurus Harian atau sekitar 18%, untuk anak cabang itu 2 orang dari 17 Pengurus harian atau sekitar 12%, dan tingkat ranting harus menempatkan 1 perempuan dari 11 pengurus harian atau sekitar 7%..*

5. Adakah Kebijakan atau peraturan dalam AD/ART Partai yang menyebutkan Bab ataupun undang-undang Khusus tentang keterwakilan ataupun Peran perempuan dalam Partai Politik, Berapa Kuota yang di berikan Partai dalam hal ini?

Jawab : *Terkait dengan peran perempuan dalam partai itu sendiri, aturan main yang sudah ada yaitu dalam anggaran dasar (AD) PPP sudah ditetapkan yaitu dalam pasal 13, 21,28,35, dan 40*

6. Bagaimana Kedudukan Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan ?

Jawab : *Karena sumber daya kader yang sudah saya jelaskan diatas yaitu minimnya jumlah kader perempuan di dalam Partai maka perihal kedudukan perempuan masih jauh di bawah laki-laki itu bisa di lihat dari jumlah pengurus harian dalam pimpinan pusat yang berjumlah 37 orang perempuan hanya baru bisa mendapatkan posisi sebanyak 7 orang dan itupun sudah ada dalam AD/ART kemudian terkait hal ini maka AD/ART akan dirubah dalam muktamar selanjutnya.*

7. Seberapa banyak Jumlah Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Partai ?

Jawab : *Itu sudah di jelaskan diatas bahwa jumlah perempuan yang mempunyai pengaruh dalam pengambil keputusan di setiap rapat pengurus Harian (PH) di tingkat pusat itu sebanyak 7 orang dan seterusnya.*

8. Bagaimana hubungan interaksi elite politik perempuan dan laki-laki dalam partai persatuan pembangunan?

Jawab : *Kami mempunyai hubungan interaksi yang sangat baik dengan bapak-bapak dalam partai karena kita berjalan di posisi masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan komunikasi yang cukup baik, contohnya dalam perekrutan calon legislatif kader perempuan dalam partai juga aktif dan terlibat dalam proses tersebut*

9. Usaha apa yang dilakukan perempuan dalam pengembangan partai persatuan pembangunan ?

Jawab : Usaha yang dilakukan oleh partai adalah dengan membentuk wing Organisation (Organisasi sayap. PPP sangat konsen terhadap pemberdayaan perempuan oleh karena itu PPP membentuk dua organisasi sayap untuk lembaga pengkaderan dan lembaga rekrutment adapun organisasi sayap tersebut adalah Wanita Persatuan pembangunan dan Majelis Taklim Maratus Sholihah dimana pprogram yang kita laksanakan didalamnya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kader yang dilaksanakan di setiap tingkatan khususnya di pusat.

10. Jika di Komparasikan dalam hal loyalitas bagaimana kemitran antara perempuan dan Laki-laki dalam parrtai Persatuan pembangunan?

Jawab : Berbicara tentang loyalitas, kader perempuan lebih istiqomah dibandingkan dengan kaum laki-laki karena banyak dilihat dari periode yang lalu-lalu banyak pengurus laki-laki yang menyatakan keluar dari partai dan pindah ke partai lain dan walaupun ada beberapa yang keluar akan tetapi ia kembali lagi dalam partai. sedangkan untuk perempuan khususnya unutu Pengurus hanya ada 1 orang saja itupun posisinya sebagai salah satu penasehat .jadi lelas jika **berbicara** loyalitas kader perempuan **memiliki** loyalitas yang tinggi di bandingkan dengan laki-laki. Dan jika berbicara kemitraan kita memiliki kemitraan yang sangat baik dengan laki-laki dalam parttai karena komunikasi kami yang terjalin cukup baik.

11. Bagaimana Kredibilitas Perempuan dalam Partai PPP?

Jawab : Untuk permasalahan Kredibilitas, jika di lihat dari jumlah persentase kader antara perempuan dan laki-laki itu sama, akan tetapi jika berbicara kualitas kader perempuan kita masih sangat rendah.

12. Jika menghadapi kendala yang menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adakah program yang dibuat untuk masalah tersebut?

Jawab : Ada program pelatihan kader di semua tingkat dalam WPP untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan tersebut. dan perempuan

Jakarta, 16, Agustus 2008

Ir. Nurhayati Payapo

*Ketua DPP PPP bidang Pemberdayaan Perempuan
Periode 2007-1012*

Hasil wawancara Skripsi

Perempuan Dalam Partai Politik Islam di Indonesia Study Terhadap Peranan Perempuan Dalam Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Dalam Perpolitikan Di Indonesia Tahun 1972-2004

Nama Responden : Dra. Hj. Mursyidah Thair, MA
 Jabatan : WaSekJen DPP PPP Bidang Pemberdayaan Perempuan
 Sekretaris Umum PP Wanita Persatuan Pembangunan
 Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan IIQ Jakarta
 Tanggal : 20 Agustus 2008
 Waktu : 08.00-09.00 WIB
 Tempat : Institut Ilmu Al-Quran Jakarta

1. Bagaimana kedudukan Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan ?

Jawab : *Alhamdulillah di PPP sudah setara itu sesuai dengan kuota 30% akan tetapi sebelum disahkannya Undang-undang tersebut PPP sudah mengantisipasi dengan sistem nominal untuk di DPP sebanyak 7 orang, DPW 5 orang DPC 4 orang. Mereka semua yang masuk dalam pengurus tersebut memiliki hak istimewa untuk menentukan calon legislatif. dan selain itu terkait dengan isu-isu mengenai perempuan itu lebih signifikan dan dapat lebih mudah diakomodir*

2. Seberapa banyak Jumlah Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Partai ?

Jawab : *selain jumlah 7 orang untuk di DPP dimana sudah tercantum dalam Ad PPP juga dibantu dengan pengurus di departemen atau bisa di bilang 50:50 di setiap departemen ada yang memiliki banyak pengurus perempuan dan minimal disetiap departemen ada pengurus perempuannya.*

3. Bagaimana hubungan interaksi elite politik perempuan dan laki-laki dalam partai persatuan pembangunan?

Jawab : *Sejauh terkait dengan program partai itu sama, hingga pelatihan kader di daerahpun interaksinya juga sama.*

4. Usaha apa yang dilakukan perempuan dalam pengembangan partai persatuan pembangunan ?

Jawab : *1. Dengan Program dan 2. Dengan pendekatan politik. Dan terkait dengan pendekatan politik itu dengan organisasi sayap di PPP yang bernama WPP. WPP adalah organisasi sayap kanan PPP yang merekrut ibu-ibu, istri-istri para pejabat, pesdukong hingga simpatisan PPP di seluruh Indonesia dengan jenjang pengurusannya pun ada dari tingkat pusat hingga ke cabang. Setelah itu*

perempuan yang tergabung dalam WPP juga membuat suatu kekuatan politik melalui pengajian yang bernama Majelis Taklim Maratus Sholihah yang ada di semua tingkatan di seluruh Indonesia

5. Jika di Komparasikan dalam hal loyalitas bagaimana kemitran antara perempuan dan Laki-laki dalam partai Persatuan pembangunan?

Jawab : *loyalitas itu tergantung dengan tugas itu sama antara laki-laki dan perempuan*

6. Bagaimana Kredibilitas Perempuan dalam Partai PPP?

Jawab : *selama tidak terdapat pelanggaran terhadap AD/ART, kredibilitas perempuan PPP itu bagus dan memadai karena perempuan yang di rekrut memiliki basis masa sendiri latar belakang politik, akademis, dan pekerjaan yang baik*

7. Jika menghadapi kendala yang menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adakah program yang dibuat untuk masalah tersebut?

Jawab : *jika ada ketimpangan itu diadakan program partai dengan pelatihan kader di semua tingkatan untuk panitianya laki-laki itu 70% dan perempuan 30% dan itu diseragamkan di semua pelatihan.*

8. Apakah ada pendidikan atau diklat khusus Untuk kader perempuan di PPP?

Jawab : *ada, itu dilakukan oleh pusat mengundang dan mengadakan pelatihan untuk wakil-wakil perempuan di tingkat wilayah kebawah dan seterusnya untuk proses pengkaderan.*

9. Apakah nama diklat atau pelatihan tersebut dan bagaimana tingkatannya?

Jawab : *tidak ada nama atau program khusus pelatihan yang ada sesuai dengan peristiwa yang ada di Indonesia yang sedang berlangsung dan juga tidak ada nama lembaga diklat khusus semua pelatihan yang ada dibawah naungan PPP dengan WPP sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional*

Jakarta, 16, Agustus 2008

Dra. Hj. Mursyidah Thair, MA
*Sekretaris Umum Pimpinan Pusat
 Wanita Persatuan Pembangunan
 Partai Persatuan Pembangunan*

No: : Istimewa

Jakarta, 26 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikan surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wabillahirtaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



No: : Istimewa

Jakarta, 20 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikannya surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya untuk menjadi pertimbangan bapak maka dengan ini **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

HJ. TATI HARTIMAH,MA

Pembimbing

SITI ROHIMAH

Pemohon

Mengetahui,

LILY FACHRIYAH

Kabag Akademik

No: : Istimewa

Jakarta, 21 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikannya surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya untuk menjadi pertimbangan bapak maka dengan ini **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

HJ. TATI HARTIMAH,MA

Pembimbing Skripsi

SITI ROHIMAH

Pemohon

Mengetahui,

Drs.H Ma'ruf Misbah, MA

Kajur Sejarah Peradaban Islam

No: : Istimewa

Jakarta, 21 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikan surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya untuk menjadi pertimbangan bapak maka dengan ini **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

HJ. TATI HARTIMAH,MA

Pembimbing Skripsi

SITI ROHIMAH

Pemohon

Mengetahui,

Usep Abdul Matin MA.MA

Sekjur Sejarah Peradaban Islam

No: : Istimewa

Jakarta, 21 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikan surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya untuk menjadi pertimbangan bapak maka dengan ini **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

HJ. TATI HARTIMAH,MA

Pembimbing Skripsi

SITI ROHIMAH

Pemohon

Mengetahui,

Abdullah. M.Ag

Pembantu Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora

No: : Istimewa

Jakarta, 21 Agustus 2008

Lap : 1 Lembar

Hal: : **Permohonan Izin Penelitian Data**

Kepada Yth;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Persatuan Pembangunan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak ada dalam lindungan Allah Swt, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien

Sehubungan dengan disampaikan surat permohonan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Rohimah

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan dan Semester : Sejarah dan Peradaban Islam/ XI

No Induk Mahasiswa : 104022000819

Program Study : S1 Reguler

Memohon kiranya bersedia membantu dalam pengumpulan data penelitian Sripsi. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah **Perempuan dan Partai Politik Islam Sudy tentang Peran Perempuan dalam Partai Persatuan**

Pembangunan dalam Perpolitikan di Indonesia Tahun 1976-2004. Selanjutnya untuk menjadi pertimbangan bapak maka dengan ini **saya** lampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas perihal izin penelitian dalam penulisan Skripsi.

Demikian Surat permohonan ini saya lampirkan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

HJ. TATI HARTIMAH,MA

Pembimbing Skripsi

SITI ROHIMAH

Pemohon

Mengetahui,

DR.H. ABDUL CHAIR. MA

Drkan Fakultas Adab dan Humaniora

Nomor : Istimewa

Jakarta, 01

Mei 2009

Lamp : 1 Berkas

Hal : Pengajuan Sidang (Munaqosah) Skripsi

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

Di

Tempat

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera saya sampaikan semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan sukses selalu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohimah

NIM : 104022000819

Fakultas : Adab dan Humaniora

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Bermaksud mengajukan sidang (Munaqosah) skripsi dengan judul **“PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN {PPP} TAHUN 1971-2004)”**.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

1. Abstraksi
2. Skripsi

Demikian Permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan dan menyetujui sidang (Munaqosah) berdasarkan judul saya tersebut.

Billahi al Tawfiq Wa al Hidayah
Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Pemohon

Siti Rohimah

104022000819



SUSUNAN KEPENGURUSAN DPP PPP PERIODE 2003-2008

MAJELIS SYARIAH PUSAT DPP PPP PERIODE 2003-2008

1. Ketua : KH. Maemoen Zubair
2. Wakil Ketua : KH. Syafii Hadzami
3. Wakil Ketua : KH. Nadhier Muhammad
4. Wakil Ketua : KH. Alawy Muhammad
5. Wakil Ketua : Habib Idrus bin Hasyim Alatas
6. Wakil Ketua : KH. Syaugi Thohir
7. Wakil Ketua : KH. Fachrurrozi Ishaq
8. Wakil Ketua : DR. H. Zakiruddin Djamin, SH, MM, MBA, MSc.
9. Wakil Ketua : KH. Endang Zainal Abidin

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT DPP PPP PERIODE 2003-2008

1. Ketua : H. Ismail Hasan Metareum, SH.
2. Wakil Ketua : Drs. H. Tosari Widjaja
3. Wakil Ketua : Drs. H. Barlianta Harahap
4. Wakil Ketua : H. Sukardi Harun
5. Wakil Ketua : H. Urai Faisal Hamid, SH.
6. Wakil Ketua : KH. Ismail Muzakky
7. Wakil Ketua : Chodidjah HM. Soleh
8. Wakil Ketua : H. Muzaini Ramli
9. Wakil Ketua : Drs. H. Abduh Paddare

MAJELIS PAKAR PUSAT DPP PPP PERIODE 2003-2008

1. Ketua : Prof DR. Bunyamin Ramto
2. Wakil Ketua : DR. Ir. Djoko Munandar, MM, MEng.
3. Wakil Ketua : Drs. H. Sugiharto, MBA
4. Wakil Ketua : Drs. H. Mukrom As'ad
5. Wakil Ketua : Drs. HBT. Achda

6. Wakil Ketua : Prof. DR. Tb. Rony Niti Baskoro
7. Wakil Ketua : DR. Erman Munzir
8. Wakil Ketua : Drs. H. Asnawi Latief
9. Wakil Ketua : DR. Muchtar Aziz, MA.

Sekretaris : Drs. H. Maksum Zaeladry

1. Wakil Sekretaris : Drs. H. Husnan Bey Fanani, MA.
2. Wakil Sekretaris : Ir. Syamsul Bachri
3. Wakil Sekretaris : Adhiyaksa Dault, SH.
4. Wakil Sekretaris : Lukharni, SH.MH.
5. Wakil Sekretaris : DR. Ir. Pramudya
6. Wakil Sekretaris : H. Mohammad Rodja, SH.
7. Wakil Sekretaris : Drs. H. Marwan Saridjo
8. Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Enny Suniyah
9. Wakil Sekretaris : H. Hasan Zaenal
10. Wakil Sekretaris : Mayasak Johan, SH, MH.

PENGURUS HARIAN PUSAT DPP PPP PERIODE 2003-2008

1. KETUA UMUM : DR. H. Hamzah Haz
2. Wakil Ketua Umum : H. Alimarwan Hanan, SH
3. Ketua Bidang : Drs. H. Endin AJ. Soefihara, MM.
4. Ketua Bidang : Drs. HA. Hafidz Maksum
5. Ketua Bidang : Drs. H. Hazrul Azwar
6. Ketua Bidang : Drs. H. Zarkasih Nur
7. Ketua Bidang : H. Yudo Paripurno, SH
8. Ketua Bidang : H. Djuhad Mahja, SH. CN
9. Ketua Bidang : H. Burhanuddin Somawinata
10. Ketua Bidang : H. Rusnain Yahya
11. Ketua Bidang : H. Mahfudhoh Aly Ubaid

12. Ketua Bidang : H. Ahmad Fahrial
13. Ketua Bidang : H. Sulaiman Fadely
14. Ketua Bidang : Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, MSi.
15. Ketua Bidang : H. Andi M. Galib, SH
16. Ketua Bidang : Drs. H. Surya Darma Ali
17. Ketua Bidang : Tgk. Drs. H. Muhammad Yus

Sekretariat

1. **SEKRETARIS UMUM** : H.M. Yunus Yosfiah
2. Wakil Sekretaris Umum : Drs. H. Chozin Chumaidy
3. Sekretaris Bidang : H. HM. Taher Saimima, SH.
4. Sekretaris Bidang : Drs. H. Zainut Tauhid
5. Sekretaris Bidang : H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto
6. Sekretaris Bidang : Drs. H. Imam Suhardjo
7. Sekretaris Bidang : Dra. Lena Mariana Mukti
8. Sekretaris Bidang : Drs. H. Anwar Sanusi, SH
9. Sekretaris Bidang : H. Emron Pangkapi
10. Sekretaris Bidang : H. Chairul Anwar Lubis
11. Sekretaris Bidang : H. Lukman Hakiem
12. Sekretaris Bidang : Drs. H. Ahmad Muqowam
13. Sekretaris Bidang : Ir. Abdurahman Syagaff
14. Sekretaris Bidang : Drs. H. Syukur Sabang
15. Sekretaris Bidang : Drs. H. Lukman Hakim Saefudin
16. Sekretaris Bidang : H. Sofyan Usman
17. Sekretaris Bidang : Dra. Hj. Ermalena, MHS

Bendahara

1. Bendahara : Habil Marati
2. Wakil Bendahara : H. Syahril Agamas
3. Wakil Bendahara : Iedil Suryadi

